KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

Oleh:

RIZKY DIMAS PRATAMA

NIM. I01216032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

AGUSTUS 2020

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bissmillahirahmanirahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizky Dimas Pratama

NIM : I01216032

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik manapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 17 Juni 2020

Yang menyatakan,

Rizky Dimas Pratama
NIM. I01216032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Dimas Pratama

NIM : I01216032

Program Studi : Ilmu Politik

yang berjudul **"KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA "**, Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 17 Juni 2020

Pembimbing ,

Dr. Abdul Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031200 2

PENGESAHAN

Skripsi oleh Rizky Dimas Pratama judul: **"KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 10 Agustus 2020.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I

Dr. Abdul Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Penguji II

Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP. 197803152003121004

Penguji III

Zaky Ismail, M.Si
NIP. 198212302011011007

Penguji IV

Holilah, S.Ag, M.Si
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 10 Agustus 2020

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan

Prof. Ali Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Dimas Pratama

NIM : I01216032

Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik

E-mail address : rizkydtama.36@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Kebijakan Revitalisasi Gelanggang Olahraga Delta Sidoarjo dan Dampaknya Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2020
Penulis,

(Rizky Dimas Pratama)

Hasil Turnitin 14 % (Revisi – Ke 02)

ABSTRAK

Rizky Dimas Pratama, 2020, *Kebijakan Revitalisasi Gelanggang Olahraga Delta Sidoarjo Dan Dampaknya Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : *Kebijakan Revitalisasi, Pedagang Kaki Lima*

Hadirnya pedagang kaki lima yang hampir menempati setiap kota seringkali memunculkan dampak negatif terlebih pada keindahan kota. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu jajaran pemerintahan yang saat ini fokus dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Muncul permasalahan terkait kebijakan revitalisasi dan penataan pedagang kaki lima di kawasan GOR Sidoarjo yang berujung adanya perselisihan kepentingan antara kelompok pedagang kaki lima dengan Disporapar Kabupaten Sidoarjo yang dinilai tidak memperhatikan keberadaan PKL di kawasan GOR Sidoarjo.

Penelitian berfokus pada langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan kebijakan revitalisasi kawasan GOR. Sekaligus berfokus pada dampak dijalankannya kebijakan revitalisasi terhadap keberadaan kelompok pedagang kaki lima. Jenis penelitian yang dijalankan menggunakan metode kualitatif, melakukan penggalian data dengan menemui beberapa pihak yang terlibat dalam kebijakan. Hasil penelitian berupa narasi yang diperoleh dari data penelitian melalui obeservasi, wawancara terstruktur, dan *literature research*. Paradigma berpikir dalam memahami studi riset ini meliputi konsep revitalisasi kawasan, konsep kebijakan publik, dan teori konflik Rafl Dahrendorf.

Hasil yang didapatkan bahwa revitalisasi sejatinya dijalankan pada tahun 2018-2024 dengan fokus untuk mempercantik kawasan GOR Sidoarjo yang dinilai sebagai salah satu kawasan penopang wajah Kabupaten Sidoarjo, juga mempuyai tujuan untuk meningkatkan retribusi kawasan olahraga, meningkatkan prestasi atlet-atlet, serta fokus dalam mengatur menata kembali pedagang kaki lima yang berada di kawasan GOR Sidoarjo. Dampak yang dirasakan pedagang kaki lima atas munculnya kebijakan revitalisasi kawasan GOR adalah dilakukannya penataan ulang yang bertujuan untuk meyeragamkan keberadaan PKL agar dapat beroperasi di bagian barat kawasan GOR. Munculnya kebijakan ini tidak dibarengi dengan penataan yang serius dan komunikasi yang maksimal antar pemangku kepentingan, mengakibatkan pendapatan pedagang menurun secara drastis dengan dijalankannya sistem satu pintu yang menutup 3 akses pintu keluar-masuk kawasan GOR. Ditambah munculnya konsep kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bahwa pedagang yang beroperasional diwajibkan menggunakan kendaraan untuk berdagang. Kebijakan tidak memunculkan konsensus dari pihak pemangku kepentingan sehingga memperlambat upaya dalam memvitalkan kembali suatu kawasan kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Rizky Dimas Pratama, 2020, *The Revitalization Policy for Delta Sidoarjo Sports Center and the Impact on Existence of Street Vendors*, Essay of Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

Keyword: *Revitalitation Policy, Street Vendors*

The presence of street vendors who almost occupy every city often has a negative impact, especially on the beauty of the city. Sidoarjo regency government is one of the government ranks currently focused on structuring street vendors. Problems arise related to the policy of revitalization and arrangement of street vendors in the Sidoarjo Sports Hall area, which has resulted in a dispute between the groups of street vendors and the Sidoarjo Regency Disporapar which is considered to have paid no attention to the existence of street vendors in the Sidoarjo Sports Hall area.

The research focuses on the steps of the Sidoarjo Regency Government in implementing the revitalization policy for the GOR area. At the same time, it focuses on the impact of the revitalization on the existence of a group of street vendors. This type of research is carried out using qualitative methods, conducting data mining by meeting several parties involved in the policy. The results of the study are in the form of a narrative obtained from research data through observation, structured interviews, and literature research. The paradigm of thinking in understanding this research study includes the concept of regional revitalization, the concept of public policy, and Rafl Dahrendorf's conflict theory.

The results obtained show that revitalization was actually carried out in 2018-2024 with a focus on beautifying the Sidoarjo Sports Hall area which is considered to be one of the supporting areas for the face of Sidoarjo Regency, also has the goal of increasing sports area levies, improving athletes' achievements, and focusing on managing and restructuring the street vendors in the Sidoarjo Sports Hall. The impact felt by street vendors on the emergence of the revitalization policy for the GOR area is the rearrangement aimed at uniforming the existence of street vendors so that they can operate in the western part of the GOR area. The emergence of this policy was not accompanied by a serious arrangement and maximum communication between stakeholders, resulting in a drastic decrease in traders' income with the implementation of a one-door system that closes 3 access gates to and out of the GOR area. Added to this is the emergence of a policy concept from the Sidoarjo Regency Government that operating traders are required to use vehicles to trade. The policy does not generate consensus from stakeholders, thus slowing down efforts to re-capitalize a piece city area.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
PERNYATAAN ix
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR TABEL xv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 13
3. Tujuan Penelitian 13
4. Manfaat Penelitian 13
5. Definisi Konseptual 14
6. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KAJIAN TEORITIK

1. Penelitian Terdahulu 23
2. Kajian Pustaka 34
   2.1 Konsep Revitalisasi 34
   2.2 Asas dan Urusan Pemerintah Daerah 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.3 Konsep Pedagang Kaki Lima 37

3. Kerangka Teori 39
3.1 Teori Konflik Rafl Dahrendorf 39
3.2 Teori Revitalisasi 46
3.3 Teori Kebijakan Publik 49

4. Kerangka Berpikir 59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian 60

2. Lokasi Penelitian 61

3. Pemilihan Subyek Penelitian 63

4. Tahap-Tahap Penelitian 65

5. Teknik Pengumpulan Data 68

6. Teknik Analisis Data 70

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 72

8. Jadwal Penelitian 73

BAB IV KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Hasil Penelitian 75
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 75
1.2 Gambaran Umum Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 79
1.3 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 82
1.4 Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 89

2. Pembahasan Penelitian 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.1 Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 116
2.2 Dampak Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 124

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan 130

2. Saran 132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jam Operasional GOR Delta Sidoarjo 10

Gambar 2. Geografis Kabupaten Sidoarjo 76

Gambar 3. Letak Geografis Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 81

Gambar 4. Fasilitas Gedung Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 81

Gambar 5. Zonasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 82

Gambar 6. Rencana Site Plan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 102

Gambar 7. Pemilihan lokasi mengenai rencana pembangunan fasilitas lapangan Basket *Outdoor* 107

Gambar 8. Pemilihan Lokasi Dalam Rencana Pembangunan Fasilitas Lapangan Futsal *Outdoor* 107

Gambar 9. Pemilihan Lokasi Dalam Kebijakan Penataan PKL Makanan dan Minuman 109

Gambar 10. Pemilihan Lokasi Dalam Kebijakan Penataan PKL Non-makanan dan Non-minuman 109

Gambar 11. Site Plan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah PKL yang berada di kawasan GOR Sidoarjo 8

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 23

Tabel 3. Jadwal Kegiatan Penelitian 75

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2015..... 78

Tabel 5. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo..... 79

Tabel 6. Jumlah PKL menurut Beberapa Sumber..... 90

Tabel 7. Dasar Hukum Kebijakan Revitalisasi Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo..... 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persoalan mengenai keadilan sampai saat ini menjadi perhatian khusus oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang memperhatikan keadilan sosial atau yang disebut dengan kalangan intelektual. Sejauh ini ruang publik dipenuhi dengan konflik kepentingan diantara individu maupun kelompok sosial, hal ini akan menyebabkan suatu hasil keputusan yang biasa dikenal menang atau kalah, akan ada individu atau kelompok yang merasakan kemenangan atas kepentingannya dan begitupula sebaliknya, ini yang menimbulkan pemikiran bahwa kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Dari setiap permasalahan dimana hal itu tidak mendapatkan suatu keadilan yang setara, subjek otomatis yang akan disalahkan adalah pemerintahan. Masyarakat menganggap pemerintah sebagai agen yang memberikan fasilitas kepadanya akan kebutuhan-kebutuhan sosial yang diharapkan berpihak pada kalangannya, sehingga jika suatu kebijakan yang diciptakan lebih mengarah untung pada pemerintah akan dianggap sebagai kebijakan yang berpusat pada satu pihak saja meskipun tidak seterusnya seperti itu. Thomas R. Dye dalam karangan Inu Kencana Syafie, memberikan *statement* bias tentang kebijakan publik, "*whatever goverments choose to do or not to do",* Pemerintah sebagai kelompok orang-orang yang bergerak secara institusional yang mampu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam urusan eksekusi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengoordinasikan, memimpin hubungannya dengan masyarakat yang dipimpinnya, antar departemen dan unit dalam pemerintah itu.[2]

Dalam buku karangan Solichin Abdul Wahab, W.I. Jenkins merumuskan makna kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan diambil oleh aktor politik atau sekelompok aktor yang berkenaan pada tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapai keinginannya, dan pada prinsipnya keputusan-keputusan tersebut masih dalam ranah kewenangan para aktor tersebut.[3] Pada dasarnya, kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan permasalahannya. Kebijakan publik membahas bagaimana isu dan persoalan itu disusun, didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan diletakkan dalam agenda kebijakan. Apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil jalan tersebut, dan efek apa yang akan dirasakan, kebijakan publik merupakan studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah dalam penyusunan dan merespon kepentingan publik, wajar jika keputusan dan tindakan pemerintah tidak memenuhi rasa keadilan, maka masyarakat dapat menolaknya.[4]

Kabupaten Sidoarjo atau yang disebut Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang ada di daerah provinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terkenal dengan adanya peristiwa semburan lumpur yang diakibatkan oleh PT. Lapindo pada tahun 2006, tepatnya di kecamatan porong bagian selatan Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Peristiwa

---

[2] Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 12
[3] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 15
[4] Surya Femana, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Folosofis* (Jakarta: AR-RUZZ Media, 2017), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memakan korban dan tempat tinggal para korban, juga lapangan pekerjaan yang ada di kecamatan tersebut, dengan adanya pertistiwa alam seperti itu, calon Bupati Sidoarjo yang sampai 2019 menjabat sebagai Bupati mempunyai rencana strategis pembangunan ekonomi dengan memberdayakan masyarakatnya, terutama mereka yang tekena dampak semburan lumpur lapindo agar dapat menjadi masyarkat yang menguasai ekonomi kreatif melalui UKM dan menjadi pedagang kreatif lapangan atau yang disebut sebagai PKL di pusat keramaian kota. Rencana Bupati Saiful Ilah yang mejabat di Kabupaten Sidoarjo mampu membangkitkan perekonomian dengan memberikan fasilitas alun-alun sebagai wadah untuk para PKL berdagang menjual produk yang mereka miliki kepada yang berminat.

Pada tahun 2011, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan kebijakan bahwa harus melakukan relokasi para PKL ditempat yang lebih layak karena mereka dianggap sebagai golongan pedagang yang tidak sedap dipandang jika berada di kawasan taman kota. Selain itu, PKL di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo menjadi faktor kemacetan dan kebersihan terganggu di areal taman karena dinilai PKL semakin saat itu semakin menjamur dan tidak tertata sehingga kegunaan fasilitas umum yang semula menjadi tempat berkumpunya keluarga atau kumpulan organisasi dan bermain menjadi sentra PKL yang tidak beraturan.[5] Peraturan Menteri Dalam Negeri sudah mengatur secara tertulis hal-hal yang harusnya dilakukan pemerintah dalam penataan dan pemberdayaan PKL, peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mewujudkan

[5] Indah Prabawati, "Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo(Studi Pada Relokasi PKL Alun-Alun Ke Gor Delta Sidoarjo)," Jurnal Administasi Negara Universitas Negeri Surabaya 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0-216),: 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempatan berusaha untuk PKL melalui penetapan lokasi baik lokasi sementara maupun lokasi permanen, dan berguna untuk menghidupkan perekonomian mikro yang mandiri dan teguh.[6] Selanjutnya, sesuai yang tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didalamnya berbunyi dilarang berusaha atau berdagang disepanjang jalan, taman, dan jalaur hijau, dan tempat umum.[7] Peraturan Daerah tersebut juga didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 3 Tahun 2016 mengenai pemberdayaan PKL dimana pemerintah melakukan pembinaan dengan cara mendata jumlah dan jenis produk yang dijual-belikan serta menetapkan lokasi untuk para PKL agar mereka dapat menjalankan aktifitas dagangnya.[8] Melihat realitas yang ada, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim yang dibentuk khusus untuk pembinaan PKL dan melakukan relokasi, setelah melakukan tugasnya, Tim Pembinaan PKL dan Relokasi menetapkan untuk melakukan relokasi PKL dari alun-alun Sidoarjo yang sebelumnya menawarkan 4 tempat namun hanya menjadi 3 tempat saja yang dapat dijadikan lokasi usaha sementara, yaitu areal GOR Delta Sidoarjo, Jl. Gajah Mada, dan Jl. Jenggala. Namun dari kesepakatan mayoritas PKL memilih GOR Sebagai representatif untuk berjualan, namun juga ada beberapa

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

[7] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

[8] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang yang memilih Jl. Gajah Mada menjadi tempat usahanya.[9] Dengan adanya kesepakatan yang didapati, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan fasilitas berupa stan tenda untuk berusaha di dua lokasi sementara, yaitu areal GOR Delta Sidoarjo dan di pinggiran jalan Gajah Mada.[10]

Hingga 2018 PKL yang mendapatkan lokasi permanen untuk membuka usaha hanyalah para PKL yang berada di Jalan Gajah Mada. Bukan tanpa sebab, karena PKL yang ada di Gajah Mada menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan Gajah Mada, mengingat ruas jalan ini adalah jalan akses utama Surabaya-Malang sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus cepat melakukan pemindahan lokasi untuk tempat usaha masyarkatnya, mendapatkan tempat untuk melakukan relokasi PKL dari sepanjang ruas jalan Gajah Mada ke Sentra PKL Gajah Mada yang berada di perbatasan jalan Gajah Mada dengan jalan Majapahit Kabupaten Sidoarjo. Berbeda situasi dengan PKL yang menjajahkan produknya di kawasan Taman Pinang Sidoarjo, adanya kesemerawutan lingkungan baik kemacetan dan menjadi kumuh di sekitaran lingkungan Taman Pinang, menjadikan warga taman pinang menolak keberadaan PKL dan membuat petisi untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar menyikapi dan menindaklanjuti petisi sehingga PKL tidak ada lagi di lingkungan mereka. Tak jarang PKL di kawasan Taman Pinang melakukan gesekan secara fisik maupun verbal dengan Satpol PP

[9] Cintatya Cindy Bilqisa, "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Alun-Alun Sidoarjo." 3

[10]"Relokasi Alun-alun Ditunda Lagi",*Okezone.com*, diakses Tanggal 30 Januari 2020 https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2011/05/16/340/457822/relokasi-pkl-alun-alun-ditunda-lagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengamankan kawasan tersebut agar tidak digunakan kembali oleh PKL untuk berjualan.[11] PKL yang berada di areal GOR pun demikian, dilakukan penertiban oleh Satpol PP kepada para PKL yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan di Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi, PKL yang kegiatan usaha menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat larangan parkir, pemberhentian sementara, dan diatas trotoar.[12] Kemudian Perbup ini dilengkapi dengan peraturan bupati nomor 47 tahun 2018 bahwa larangan untuk PKL yang melewati lokasi yang diperbolehkan untuk membuka usaha, baik jenis tempat usaha yang tidak bergerak maupun tempat usaha yang bergerak.[13] Hingga saat ini, para PKL di tiga titik penjualan masih merasa adanya perbedaan, baik dalam segi pendapatan maupun kenyamanan yang mereka rasakan, adanya pemindahan lokasi PKL dari Alun-alun menjadi 3 tempat yang berbeda membawa dampak signifikan terhadap pendapatannya dan mereka juga kehilangan pelanggan tetap yang saat itu masih beroperasi menjajakkan dagangannya di Alun-Alun Sidoarjo.[14]

Jika diperhatikan, kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang berada di kawasan alun-alun untuk dipindahkan menjadi 3 tempat baru hanyalah kebijakan yang bersifat memindahkan permasalahan bukan untuk

[11] Ahmad Surya Hadi Kusuma, "Problematika Penataan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Taman Pinang Sidoarjo." hal 4
[12] Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo
[13] Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo
[14] Observasi oleh Penulis, GOR Delta Sidoarjo,Sentra PKL Gajah mada, Taman Pinang Indah. 24-25 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan permasalahan. Menurut Sinaga dalam jurnal yang ditulis oleh Hatta Karuniawan, diadakannya relokasi juga berdampak pada segi positif mauapun negatif yang berimbang dalam memberikan penilaian. Adanya dampak positif dari dilakukannya relokasi adalah meningkatnya kenyamanan serta keamanan usaha, perubahan status PKL dari kegiatan formal menjadi kelompok sosial yang legal dalam menjalankan usahanya. Namun juga mencakup dampak negatif antara lain dengan meningkatnya biaya operasional, menurunnya pendapatan, dan melemahnya jaringan sosial. Sehingga kedua dampak tersebut akan berimbas pada indeks keberhasilan pembangunan ekonomi dilakukan oleh PKL yang terdampak pada kebijakan relokasi, baik buruknya tergantung bagaimana pemerintah memperhatikan kelompok yang terdampak dari munculnya kebijakan.[15]

Persoalan PKL di Kabupaten Sidoarjo kembali meraba di tahun 2019. Kali ini permasalahan disebabkan oleh kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PKL, Pemkab Sidoarjo mempunyai rencana untuk melakukan revitaliasasi kawasan GOR agar dapat kembali menjadi kawasan olahraga sesuai dengan fungsi bangunannya, dengan melakukan pendirian gerbang dan pagar besi tinggi disekitar kawasan GOR Delta Sidoarjo agar dapat mempercantik lokasi yang dinilai masih kurang adanya penghijuan. Diadakannya kebijakan merelokasi para PKL alun-alun di kawasan GOR pada 2011, GOR merupakan fasilitas umum untuk melakukan kegiatan berupa olahraga bagi masyarakat Sidoarjo yang saat ini beralih fungsi sebagai

[15] Mochammad Hatta Karuniawan, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)", Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo,JKMP (ISSN. 2338-445), volume 3 no 1, Maret 2015, 1-116, hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan bagi para pedagang menjajahkan produknya. Menurut data yang dihimpun bahwa jumlah PKL yang berada di kawasan GOR tidak bisa didapatkan data yang aktual karena pada dasarnya pedagang yang datang dikawasan tidak dapat diprediksi, asalkan mendapatkan tempat mereka akan berdagang di kawasan GOR Sidoarjo. Berikut merupakan data jumlah PKL yang dihimpun dari informan penelitian

SUMBER	JUMLAH PKL
Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Olahraga	>300
Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo	294
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo	108
Ketua PKL Kawasan GOR Sidoarjo	>400

Tabel 1. Jumlah PKL di kawasan GOR Sidoarjo

Dengan jumlah yang disebutkan oleh beberapa informan penelitian, dapat diketahui jumlah PKL yang berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo membludak sehingga berdampak adanya disfungsi kawasan GOR Sidoarjo menjadi kawasan yang dinilai kumuh dan menjadi antusias pemerintahan untuk menjalankan revitalisasi karena GOR Sidoarjo merupakan salah satu *Landmark* yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Rencana Pemerintah dalam merevitalisasi GOR Delta Sidoarjo adalah melakukan pendirian gerbang di sepanjang kawasan GOR dilakukan kurang lebih selama 9 bulan, dan pembangunan pos pengamanan yang selesai pada bulan Oktober 2019,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rampungnya pembangunan pagar serta gerbang masuk dan pos pengamanan, Pemkab Sidoarjo selanjutnya memberlakukan jam operasional di kawasan GOR Sidoarjo dalam rangka membatasi kegiatan yang ada di kawasan tersebut.[16]

Dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam merevitalisasi GOR Delta Sidoarjo dan memberikan jam operasional pada kawasan GOR Delta Sidoarjo serta membuka 1 jalan utama untuk masuk ke kawasan GOR Delta Sidoarjo yang dulunya, ada beberapa pihak yang tidak dapat menerima kebijakan tersebut salah satunya adalah para PKL yang beroperasi di kawasan GOR Sidoarjo. Para PKL merasa kehadiran mereka di kawasan GOR Delta Sidoarjo tidak dipertimbangkan, sampai saat ini mereka tetap mematuhi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan mematuhi apa yang diarahkan oleh pembina PKL dalam beroperasi di kawasan GOR, namun untuk kebijakan revitalisasi tersebut sudah tidak dapat diterima lagi. Diberlakukannya satu pintu bagian selatan dapat menyesangsarakan para PKL yang berada di bagian barat dan utara Kawasan GOR Sidoarjo, karena kebanyakan dari pembeli tidak mengambil langkah yang cukup jauh untuk mendapatkan barang yang ingin dibelinya, ditambah lagi produk yang dijualbelikan oleh para PKL pun hampir sama, ini akan berdampak pada pendapatan para PKL. Diberlakukannya pembatasan jam operasional hingga pukul 23.00 WIB, dengan ini para PKL yang memiliki target penjualan tidak dapat menyelesaikan target mereka pada satu

[16] "Kebut Revitalisasi GOR Delta, Terapkan Batasan Jam dan Tata Stan", Radar Surabaya, diakses tanggal 31 Januari 2020, https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/16/146334/kebut-revitalisasi-gor-delta-terapkan-batasan-jam-dan-tata-stan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari terutama para PKL yang bergerak diusaha makanan dan minuman karena mereka mengakui jam-jam ramai penjualan ada di malam hari sekitar pukul 21.00 WIB hingga 02.00 WIB. Para PKL mengakui bahwa kebijakan ini sama seperti mencekik perekonomiannya, terlebih lagi berjualan merupakan pekerjaan utama para pedagang di kawasan GOR Sidoarjo.[17] Adanya aturan-aturan baru yang muncul untuk penataan kawasan GOR sebelumnya tidak pernah didiskusikan sama sekali dengan pihak terdampak terutama kelompok PKL di kawasan GOR Sidoarjo. Padahal salah satu faktor kunci berjalannya suatu kebijakan menurut George C. Edward III dalam buku Arifin Tahir adalah dengan tetap menjaga komunikasi antar pihak yang bersangkutan, karena hal ini menunjukkan peran agar para pelaksana kebijakan mengetahui persis informasi yang didapatkan dan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan.[18]

Gambar 1. Pemberitahuan Tertulis Jam Operasional Kawasan GOR Delta Sidoarjo

[17] Kasmu'in, wawancara oleh penulis, 27januari 2020
[18] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merasa bahwa kepentingan mereka tidak dihiraukan, para PKL mengadu pada Seven gab LSM yang kantor operasionalnya berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo agar keinginan mereka dapat terdengar oleh pemkab Sidoarjo. Seven Gab merupakan gabungan dari 7 LSM yang ada di Kabupaten Sidoarjo, berdiri sejak 2014 yang menjadi lembaga kontrol pemerintah dalam masalah-masalah yang ada di kabupaten sidoarjo, termasuk permasalahan yang dialami oleh PKL di kawasan GOR. Tujuh gabungan LSM ini terdiri dari LSM Persatuan Pemuda Pengayom Masyarakat, LSM CePAD Indoensia (Centre for Participatory Development), LSM Wadah Aspirasi Rakyat, LSM KOMNAS (Komunitas Nasionalis), LSM AUU (Amanat Undang-Undang), LSM PAKSI (Pemuda Anti Korupsi), dan LSM KIPAS (Komunitas Pemuda Sidoarjo). Persoalan tersebut disetujui oleh pihak LSM untuk dapat menyampaikan aspirasi para PKL kepada pemkab Sidoarjo, dengan melakukan beberapa pertemuan yang diselenggarakan LSM dan PKL serta melakukan dengar keinginan dari para PKL, Seven Gab menjadi inisiator para PKL untuk dapat beraudiensi agar keluh kesah PKL dapat didengar oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.[19] Terutama status hukum dalam Perarturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, bahwa PKL mempunyai hak untuk melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sudah ditetapkan dan mendapatkan sosialisasi serta informasi terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan. Terlebih lagi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016

[19] Kasmu'in, wawancara oleh penulis, 27 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara jelas menyatakan bahwa pedagang kaki lima adalah kelompok yang harus diberikan keadilan secara proporsional dan tidak diskriminatif bagi seluruh PKL tanpa terkecuali karena memang mereka mempunyai hak atas penataan dan pemberdayaan, perlindungan, dan penghormatan atas hak asasi manusia. Juga dalam pembentukan perarturan daerah ini ditujukan untuk para PKL agar mendapatkan perhatian secara khusus dan diberikan kesempatan berusaha dengan melalui penetapan lokasi sesuai peruntukkannya.[20]

Terdapat dua kepentingan besar diantara kedua kubu, baik pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mengingikan adanya revitalisasi dan juga para PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo yang saat ini terdampak akibat kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, datangnya bantuan dari lembaga kontrol pemerintahan seperti 7 Gabungan LSM dalam meneruskan permintaan para PKL kawasan GOR diharapkan Pemerintah mampu mewujudkan kebijakan baru yang berimbas baik pada para PKL. Oleh karena itu, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghidupkan kembali fungsi GOR Delta Sidoarjo sebagaimana mestinya yaitu menjadi tempat berolahraga yang berdampak pada keberadaan PKL yang berada di sekitar GOR Delta Sidoarjo.

[20] Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang diuraikan di topik permasalahan, maka permasalahan yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan revitalisasi kawasan GOR Delta Sidoarjo ?
2. Apa dampak kebijakan revitalisasi GOR oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap kelompok pedagang kaki lima ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan diatas, maka tujuan dari diadaknnya penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui langkah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan kebijakan revitalisasi fungsi kawasan GOR Delta Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima atas diberlakukannya kebijakan revitalisasi GOR Delta Sidoarjo.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini akan berdampak pada tiga aspek, antara lain:

1. Manfaat Teoritis, menjadi wacana pembaharuan mengenai permasalahan PKL yang ada di Kabupaten Sidoarjo, serta menambah pengetahuan tentang konsep penataan PKL yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo di kawasan GOR Delta Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis, berguna untuk mengetahui tentang konsep kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan revitalisasi kawasan GOR Delta Sidoarjo yang kebijakan tersebut berdampak pada PKL yang ada di kawasan GOR Delta Sidoarjo, dan hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam bentuk informasi untuk lembaga kelompok, dan *Steakholder* yang berhubungan keterlibatannya dengan isu yang diangkat sebagai dasar dalam menemukan solusi terkait permasalahan PKL.
3. Manfaat Akademis, memberikan tawaran pembaharuan pada permasalahan isu sosial dan politik di bidang kebijakan publik. Peneliti juga dapat menjadi sumber informasi dan referensi di UIN Sunan Ampel Surabaya dalam melihat permasalahan sosial dengan kacamata politik.

5. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan tindak perwujudan makna dengan kata-kata atau penegasasn makna agar dapat membantu dan membentuk sebuah pemahaman kalimat dan tidak terjadi perbedaan penafsiran. Definisi konseptual juga berfungsi sebagai pembatasan fokus permasalahan agar hasil penelitian dapat dijangkau secara tepat.

1. Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik seyogianya dilontarkan oleh para ilmuwan sosial, Anderson dalam buku Arifin Thahir mengemukakan Kebijakan merupakan suatu tindakan yang didasari atas tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pelaku untuk memecahkan permasalahan. Parsons memberikan gambaran bahwa konsep kebijakan publik merupakan seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik, artinya sebuah kebijakan merupakan usaha untuk mendefinisikan dan menyusun rasionalitas unutk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bermanifestasi dari nilai pertimbangan. Kemudian menurut Keban bahwa *Public Policy* dpat dinilai dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, suatu proses, dan suatu kerangka kerja. Dalam konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, dalam suatu produk merupakan serangkaian kesimpulan dan rekomendasi, kebijakan publik sebagai suatu proses kebijakan dinilai darimana cara organisasi tersebut mengetahuai apa yang diharapkan dari suatu program atau bagaimana mekanisme dalam mencapai produknya, dan kebijakan sebagai suatu kerangka kerja merupakan suatu proses negosiasi dalam sebuah isu untuk merumuskan metode dalam implementasiannya.[21] Dengan adanya kebijakan yang dimaknai dalam tindakan politik, Dunn memberikan statement dalam proses analisis kebijakan merupakan aktivitas intelektual yang dilakukan dengan dasar politis. Aktivitas politis dijelaskan dalam proses yang dasarnya bersifat politis, yakni sebagai proses pembuatan kebijakan dan aktualisasi sebagai rangkaian tahap sesuai agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan. Dengan ini kebijakan publik

[21] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: ALFABETA, 2014), hal 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan suatu produk hukum yang tidak hanya sekedar hukum namun dipahami secara benar, suatu isu menyangkut kepentingan bersama dipandang untuk perlu diselesaikan maka formulasi isu menjadi kebijakan yang perlu dipertimbangkan dan disusun oleh para pejabat yang berwenang.[22] Sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh para ilmuwan sosial maka perlu adanya suatu perumusan kebijakan yang tidak hanya melibatkan satu pihak yaitu pejabat pemerintah, namun juga pihak masyrakat dan swasta agar dalam perumusan kebijakan mendorong adanya perubahan yang terencana.

2. Revitalisasi Kawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia Revitalisasi merupakan perbuatan dalam menghidupakan kembali atau menggiatkan kembali agar terlihat hidup dan berfungsi dengan benar hal yang sebelumnya terberdaya. Revitalisasi merupakan kegiatan dalam meningkatkan nilai suatu kawasan/lahan melalui diadakannya pembangunan kembali dalam satu kawasan yang dapat meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan sebelumnya. Revitalisasi kawasan bertujuan untuk meningkatkan kawasan yang berkualitas dan mempunyai konsep berkelanjutan agar fungsi kawasan dapat digunakan secara tepat oleh dan untuk masyarakat baik dalam segi produktivitas ekonomi, dan kualitas ruang dalam memberdayakan aktivitas sosial, sehingga kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah harus tepat karena kedua hal tersebut

[22] *Ibid.*, hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan syarat atau hal penting dalam melakukan revitalisasi kawasan.[23] Revitalisasi dalam kawasan GOR Delta Sidoarjo merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan peningkatan pemberdayaan sarana dan prasana yang ada. Tujuan dilakukannya revitalisasi di kawasan GOR Delta Sidoarjo yaitu; (1) menghidupkan kembali aura atau fungsi asli kawasan sebagai tempat masyarakat berkumpul dan berolahraga bukan sebagai tempat pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, (2) mempercantik tampilan kawasan GOR dengan menata pelayanan dan akses masuk yang lebih baik berupa pembangunan pos keamanan, pintu gerbang masuk dan keluar, serta pendirian pagar besi yang berbentuk orang yang sedang berolahraga sehingga tampilan dapat menarik perhatian masyarakat untuk ikut menikmati fasilitas yang dibangun, hal ini dikarenakan GOR Sidoarjo merupakan salah satu *Landmark* yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

3. Penataan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang kerap disingkat PKL identik dengan penjaja dagangan yang menggunakan gerobak sebagai sarana atau alat untuk menghampiri pelanggannya, Pedagang kaki lima disebut karena dalam berdagang jumlah kaki yang dipakai ada lima, dua kaki pedagang yang menjualkan produknya dan tiga kaki tambahan dari roda gerobak yang dibawa oleh pedagang, namun saat ini PKL juga digunakan untuk

[23] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang di jalanan pada umumnya. Pedagang kaki lima merupakan kelompok usaha kecil yang bersifat informal, pedagang kaki lima disebut sebagai distribusi barang atau jasa yang belum memiliki ijin usaha dan tempat mereka beroperasi juga berpindah-pindah. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini umumnya masyarakat miskin, berpendidikan rendah yang kebanyakan diisi oleh migran yang tidak mempunyai sifat kapitalis dalam mencari investasi menguntungkan dan hanya sekedar mencukupi segala kebutuhannya.[24] Keberadaan PKL saat ini sudah marak hampir di berbagai lingkungan kota maupun desa mendapati keberadaan mereka, dan juga marak kasus atas pergusuran PKL oleh pemerintah karena diyakini tidak memiliki ijin usaha dan belum disentuh atas peraturan yang kuat dalam hadirnya PKL di lingkungan sosial. Begitupula halnya yang dialami oleh PKL yang saat ini merasa tergusur atas kebijakan revitalisasi kawasan GOR Delta Sidoarjo, sebelumnya para PKL mempunyai dasar kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo untuk menempati lokasi usaha sementara di kawasan GOR Delta Sidoarjo, namun pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kebijakan untuk melakukan revitalisasi kawasan GOR agar menjadi kawasan yang berfungsi sebagaimana mestinya yaitu menjadi tempat olahraga. Adanya kebijakan revitalisasi berdampak pada keberadaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mereka merasa

[24] Faried Ali, Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergusur dan menjadi kelompok marjinal, tidak diberikan tempat untuk membuka usaha dan masih digantungkan dalam keputusan kebijakan relokasi PKL di tahun 2011 dengan kebijakan revitalisasi yang tumpang tindih. Keberadaan Pedagang kaki lima memang memiliki keterbatasan dalam hal lahan karena status mereka sebagai sektor informal dan tidak memiliki ijin kuat untuk beroperasi sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan hidup kelompok masyarakat yang sudah memilih keputusan tersebut untuk lapangan pekerjaan.[25]

4. Hubungan Kebijakan Revitalisasi dengan PKL

Adanya kebijakan Relokasi PKL di sekitar alun-alun yang diperintahkan oleh Bupati Sidoarjo di tahun 2011 menghasilkan tiga tempat yang ditawarkan untuk PKL berjualan, salah satunya berada di GOR Sidoarjo sebagai lokasi sementara. 8 tahun PKL dikawasan GOR masih belum mendapatkan penetapan lokasi permanen hingga akhirnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menentukan kebijakan baru untuk merevitalisasi kawasan GOR Sidoarjo yang dinilai kumuh akibat adanya PKL dan lahan tidak difungsikan selayaknya sebagai tempat olahraga, dan dipakai untuk kegiatan yang tidak berdampak positif. Sebagaimana GOR sebagai salah satu *Landmark* yang ada di Kabupaten Sidoarjo maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan revitalisasi kawasan agar GOR dapat kembali asri dan bersih sehingga fungsi

[25] *Ibid.*, hal 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawasan dapat dikembalikan seperti sebelumnya.[26] Dalam kerangka *Good Governance* menekankan pada aspek tindakan bersama yang didasari oleh keinginan para Steakholder (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dan diarahkan kepada proses kebijakan yang lebih inklusif, demokratif, dan partisipatif. Sejatinya kebijakan publik merupakan produk dari proses perumusan kebijakan publik, sehingga perlu adanya kepentingan yang didengarkan agar produk yang dijalankan dapat diterima oleh berbagai pihak, karena syarat terjadinya kontak sosial adalah komunikasi baik antar perorangan atau dengan kelompok sosial. Dengan keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan memberikan manfaat untuk mereka karena mengikuti proses perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan serta mempermudah adanya transparansi.[27] Sehingga jika ditarik dalam realita permasalahan, adanya komunikasi yang terjalin dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kelompok PKL akan berdampak pada arah kebijakan untuk merevitalisasi dan mencari solusi dalam melakukan penataan PKL di kawasan GOR Sidoarjo agar suatu produk kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan ke salah satu pihak melainkan kedua belah pihak. Adanya keterkaitan antara kebijakan revitalisasi kawasan GOR

---

[26] *"GOR Sidoarjo Terkini, Temuan Dewan dan Aparat: Sejumlah Fasilitas Dipakai Berjualan Minuman Keras*". Surabaya Tribunsews, diakses 25 Februari 2020 (https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/09/gor-sidoarjo-terkini-temuan-dewan-danaparat-sejumlah-fasilitas-dipakai-berjualan-minuman-keras

[27] Muhlis Madani, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berdampak pada keberadaan PKL yang beroperasi dikawasan tersebut.

6. Sistematika Pembahasan

1. Bab pertama pada penulisan penelitian berisi tentang Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua berisi tentang Penelitian terdahulu untuk mnunjukkan dinamika dan permasalahan yang terjadi sebelum penelitian ini dimulai, Kajian pustaka sebagai penegasan batasan tentang ciri penelitian dan permasalahan yang hendak diteliti, dan Kerangka teori dalam hal ini teori yang dipakai sebagai alat analisis merupakan teori kebijakan publik, teori revitalisasi, dan teori konflik Rafl Dahrendorf.
3. Bab Ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi mencakup pendekatan penelitian, lokasi dan waktu dilakukannya penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pemeriksaaan keabsahan data, dan jadwal dilakukannya penelitian.
4. Bab Keempat pada penulisan skripsi mencakup hasil penelitian dan penjelasan data penelitian, kemudian pembahasan penelitian yang didapatkan di informan penelitian serta realitas lapangan. Data yang didapatkan akan dianalisis menggunakan konsep kebijakan publik hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep evaluasi dampak kebijakan publik untuk mencapai validitas dan kredibilitas data.

5. Bab Kelima membahas tentang Penutup dalam penulisan laporan berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diangkat menjadi tema penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

1. Penelitian Terdahulu

Adapun data sebagai pendukung penelitian merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan rencana penelitian terkait dengan Kebijakan Pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima, antara lain:

Disajikan dalam bentuk Matriks Hasil Penelitian Terdahulu

No	Keterangan Penelitian	Temuan dan Perbedaan Penelitian
1.	Mirna Nurlaili Syawalia, *Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)di Kota Sukabumi,* Skripsi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2018	**Temuan** : Tulisan ini ditujukan sebagai reaksi oleh peneliti karena melihat masih minimnya sumber daya sektor pemerintah juga para PKL dalam mengelola dan menata PKL yang ada di kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah adanya penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kepada para PKL namun masih belum efektif dikarenakan masih kurang terintegrasinya para pemangku kepentingan dalam menjalankan tujuan melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, dan didukung oleh faktor finansial pemerintah yang berjalan kurang baik menjadi kendala dalam menuntaskan permasalahan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		para pedagang PKL di Kota Sukabumi **Perbedaan :** Perbedaan terletak pada fokus permasalahan. Jika penelitian tersebut berfokus pada penataan yang kurang efektif dikarenakan faktor finansial Pemerintah Kota Sukabumi, maka penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penyebab adanya tumpang tindih kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan relokasi di tahun 2011 dengan salah satu opsi tempat untuk para PKL di GOR Delta Sidoarjo, namun di tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendirikan bangunan berupa pagar dan gerbang besi disekitaran kawasan GOR Delta Sidoarjo yang kebijakan tesebut berdampak buruk pada penghasilan PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo.
2.	Mochammad Hatta Karuniawan, dkk, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)*, JKMP (ISSN. 2338-445X), Volume 3, Nomor 1, Maret 2015, 1-116	**Temuan :** Dalam penulisan jurnal ini, peneliti menguraikan dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh para PKL yang berada di kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, peneliti menemukan fakta bahwa dampak positif dari dilakukannya pemindahan lokasi para PKL di kawasan GOR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kabupaten Sidoarjo mendapatkan dampak positif yang dirasakan PKL dengan masih strategisnya tempat yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk para PKL melakukan pemindahan dengan masih banyaknya pembeli yang datang sehingga lokasi pemindahan dinilai strategis. Sedangkan dampak negatif dari pemindahan PKL di kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo berupa kesemrawutan tempat yang dijadikan lahan PKL membuka usahanya, juga terlihat kumug sehingga fungsi GOR Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat masyarakat untuk olahraga menjadi terganggu. **Perbedaan :** Penelitian yang akan dilakukan ditujukan untuk mengetahui rencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan revitalisasi GOR atau difungsikannya kembali sebagai kawasan olahraga masyarakat terutama masyarakat Sidoarjo, disisi lain juga untuk mengetahui rencana pemerintah dalam mengatasi nasib para PKL yang berada di kawasan GOR Sidoarjo sebagai kelompok sosial yang terdampak dengan kebijakan revitalisasi, Sehingga kedua kebijakan terkait permasalahan revitalisasi dan relokasi PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dapat dijalankan secara maksimal.
3.	Riza Ali Fikry, *Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo*, ISSN 2303-341X Volume 1, Nomor 1, Januari 2013	**Temuan :** Pada penulisan penelitian berfokus pada hubungan dialogis antara Tim Pembina PKL dengan Para PKL di kawasan Alun-alun Sidoarjo dalam menertibkan dan membina PKL, hasil penelitian didapati bahwa hubungan dialogis antara Tim Pembina PKL dan para PKL dapat dikatakan cukup baik dengan ditawarkan untuk para PKL dalam mengikuti rapat serta melakukan usulan-usulan penetapan lokasi akibat dampak relokasi di Alun-Alun Sidoarjo. Namun mendapati fakta bahwa Tim Pembina PKL masih belum memerhatikan setiap usulan para PKL sehingga kebijakan yang dibangun masih belum benar-benar dipertimbangkan serta dirasa menguntungkan salah satu pihak saja **Perbedaan :** Jika penelitian sebelumnya yang dibahas terkati dengan dibentuknya Tim Pembina PKL untuk membantu mempercepat terwujudnya relokasi PKL yang menjamur di kawasan Alun-alun Sidoarjo. Maka pada rencana penelitian yang akan dibahas, fokus penelitian bersudut pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Kabupaten Sidoarjo pasca revitalisasi untuk PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo yang sampai saat ini masih menempati lokasi usaha sementara karena mereka menginginkan adanya penataan lokasi usaha yang baik dan muncul kebijakan yang berpihak pada PKL.
4.	I Wayan Sastrawan, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,* Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 5, Nomor 1 Tahun 2015	**Temuan :** Penelitian yang dituliskan oleh I Wayan Sastrawan berfokus pada permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, penelitian dituliskan dalam maksaud mengethaui faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi untuk PKL di kawasan Pantai Penimbang Kabupaten Buleleng. Hasil yang didapatkan dalam penelitian menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah faktor aksesbilitas, visibilitas lalulintas, tempat parkir, ekspansi, lingkungan, persaingan, peraturan pemerintah. lalu faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL adalah faktor aksesibilitas sebesar 56,331%. Sedangkan permasalahan yang dihadapi PKL di Kawasan Pantai Penimbangan adalah kepastian lokasi, pembayaran retribusi, hingga kehadiran konsumen yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		insidental. Solusi permasalahan tersebut adalah bahwa PKL harus mempunyai ijin usaha pasti, jumlah retribusi disesuaikan dengan penghasilan yang didapatkan, melakukan peningkatan pelayanan, serta diadakannya petugas kebersihan oleh dinas terkait. **Perbedaan :** Penelitian yang akan ditulis, merupakan penelitian yang berfokus pada tindak kontinyu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kabupaten Sidoarjo. Peneliti juga ingin mengamati sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggapi gejolak yang terjadi antara pemerintahan dengan PKL kawasan GOR, terutama pada penyelesaian dampak yang dirasakan oleh PKL terkait kebijakan revitalisasi. Adanya kebijakan kontinyu sebagai wujud bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ingin menyelesaikan permasalahan di sektor PKL, sehingga para PKL tidak merasa menjadi kelompok yang terdiskriminasi atas kebijakan Pemerintah dalam merevitalisasi GOR Kabupaten Sidoarjo.
5	Fabiola Chrisma Kirana Analisa, *Dampak Revitalisasi Terhadap Aktivitas Vandalisme Di Kawasan Kota Lama*	**Temuan:** Tulisan ini mengangkat fenomena vandalisme di Kawasan Kota Lama Semarang (KKLS) dengan fokus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Volume 12, Nomor 2, Oktober 2018	penelitian pada program revitalisasi kawasan wisata. Peneliti memiliki tujuan untuk memperoleh gagasan di dalam relasi yang terjadi antara aktivitas vandalisme dengan revitalisasi kawasan ruang publik. Hasil dari penelitiannya adalah berkurangnya produk hasil aktivitas vandalisme yang berbanding lurus dengan kegiatan revitalisasi di Kawasan Kota Lama Semarang. Semakin banyak bangunan dan ruang publik yang dipugar (diperbaharui), semakin sedikit produk vandalisme yang tersisa. **Perbedaan :** Penelitian yang ditulis merupakan penelitian yang berfokus pada hasil temuan yang dilakukan secara deskriptif terkait dengan revitalisasi kawasan ruang publik (Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo) dengan menggunakan metode kualitatif secara *case study*, yakni dengan mendalami permasalahan yang terjadi dan menyimpulkan berdasarkan data yang didapatkan. Kemudian dari segi latar belakang terkait revitaliasi kawasan berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang berjualan didalam kawasan.
6	Puspita Sari dan Citra Asmara	**Temuan :**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Indra, Hegemoni Pasar Terhadap Pedagang Pasar *(Analisis Dominasi Pemerintah Pasca Revitalisasi Pasar Kite Sungailiat Menurut Antonio Gramsci)*, Universitas Bangka Belitung, Jurnal Society : Volume V, Nomor 1, Juni 2017	Tulisan ini berfokus pada bentuk-bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah kepada PKL akibat program revitalisasi yang dinilai tidak mengalami perubahan ke yang lebih baik secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendalaman pisau analisis yang dikemukaan oleh Antonio Gramsci tentang Hegemoni. Hasil yang ditemukan antara lain : (a) Pendekatan dilakukan pemerintah dengan cara sosialisasi dan konsensus untuk mendapatkan persetujuan pedagang. Hal ini menunjukkan bentuk hegemoni pertama yang dilakukan pemerintah dalam upaya revitalisasi pasar. (b) Hegemoni dilakukan pemerintah dalam upaya pembagian lapak. Proses pembagian lapak pedagang dilakukan dengan sistem cabut lot sebagai aturan yang ditetapkan pemerintah untuk meredam protes pedagang nantinya. (c) Pedagang yang tidak memiliki posisi tawar dan sebagai pihak yang didominasi harus dengan sadar mengikuti setiap kebijakan dan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, walaupun disisi lain pedagang memiliki kesadaran untuk melakukan perlawanan. **Perbedaan :** Penulisan Skripsi yang diangkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		mempunyai kesamaan terkait dnegan objek penelitia, yaitu duelis yang terjadi antara pemerintah daerah dengan pedagang kaki lima. Fokus penelitian yang bertujuan untuk melihat dampak yang dirasakan setelag diberlakukannya revitalisasi kawasan. Dan terkait dengan penggunaan teori dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik yang mengarah pada bagaimana kebijakan ini dijalankan dan bagaimana dampak yang dirasakan setelah dijalankannya kebijakan tersebut.
7	Nanda Puspita Ningrum, *Dampak Revitalisasi Jalur Ganda Pt. Kereta Api Indonesia Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Pinggiran Rel Di Kelurahan Glugur Darat Ii Kecamatan Medan Timur*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017	**Temuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya dampak dari revitalisasi Jalur Ganda PT. Kereta Api Indonesia terhadap sosial ekonomi keluarga pinggiran rel di Kelurahan Glugur darat II Kecamatan Medan Timur. Tipe penelitian ini tergolong penelitian eksplanatif yang bertujuan menguji atau membuktikan hipotesis dengan teknik pengumpulan data melalui kuisioner, wawancara dan observasi. Populasi dari penelitian ini adalah keluarga pinggiran rel yang tinggal di Kelurahan Glugur Darat II yang berjumlah 64 kepala keluarga. Kesimpulan adalah revitalisasi jalur ganda PT. Kereta Api Indonesia memberikan dampak terhadap kondisi perumahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		aktivitas usaha/pekerjaan sehari-hari, frekuensi berkumpul antar sesama warga pinggiran rel, tingkat kepedulian antar sesama warga pinggiran rel dan aktivitas gotong royong yang menurun. **Perbedaan:** Perbedaan dalam segi penelitian terletak pada penggunaan metode yang dijalankan untuk melihat dan memperoleh data penelitian. Jika dalam penelitian tersebut menggunakan metode campuran (*mix method*) dengan membuktikan hipotesis kebenaran melalui kuisioner, wawancara, dan hasil observasi. Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara sebagai alat untuk memperoleh data, menggunakan dokumentasi sebagai sumber data sekunder, dan melakukan trianggulasi data yang didapatkan untuk memperoleh hasil penelitian. Dengan melihat realitas bahwa banyaknya kelompok masyarakat miskin yang tidak diperhatikan keberadaanya, menggiatkan keingintahuan terkait keaktifan kelompok tersebut dalam mengetahui dan mengikuti proses perumusan kebijakan yang berdampak pada kelompoknya.

Tabel 1.Penelitian Terdahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil yang dapat dipaparkan penelitian diatas, PKL di Kabupaten Sidoarjo menjamur di tahun 2011 yang mempunyai titik sentral dagang di kawasan Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, dengan menjamurnya PKL maka munculah kebijakan baru untuk memindahkan dan menata ulang para PKL yang sebelumnya berada di tiga tempat, yaitu sepanjang jalan Gajah Mada yang saat ini sudah direlokasi di sentra PKL Gajah Mada di Jalan Gajah Mada sebagai lokasi permanen, kemudian sepanjang Jalan Taman Pinang yang sampai saat ini masih belum adanya keputusan final atas penetapan para PKL di lokasi tersebut, juga di kawasan GOR Delta Sidoarjo sebagai penetapan lokasi sementara untuk para PKL menjajahkan produknya. Dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapati dilema dalam melakukan upaya penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2011 hingga sekarang. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penataan PKL dibarengi dengan adanya peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan, namun realitas dilapangan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan masih kurang efektif dan menyisahkan pekerjaan baru bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu untuk menetapkan lokasi permanen bagi para PKL di kawasan GOR Delta Sidoarjo, munculnya ketegangan antara pemerintah kabupaten Sidoarjo dan para PKL dipicu oleh dibangunnya pagar besi dan juga gerbang pintu masuk GOR Delta Sidoarjo yang itu berdampak pada PKL yang berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Munculnya kebijakan revitalisasi kawasan GOR dinilai tidak mendukung tentang keberadaan PKL, keseriusan pemerintah akan disorot oleh peneliti dalam menyelsaikan dua permasalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar yaitu tentang menata kembali kawasan GOR sebagai kawasan olahraga dan mengatur ulang penataan PKL agar mereka tetap bisa beroperasi di kawasan GOR Sidoarjo. Munculnya demo yang dilakukan oleh PKL merupakan bentuk penolakan dari pihak PKL, maka seharusnya kebijakan yang dijalankan haruslah mempertimbangkan segala aspek dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

2. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian Kualitatif, kajian pustaka diarahkan pada penyajian informasi yang mendukung terkait gambaran umum pada tema penelitian.[28] Dengan melakukan peninjauan akan memberikan sumbangsih kemantapan dan penegasan tentang ciri penelitian dan permasalahan yang hendak diteliti.

2.1 Konsep Revitalisasi

Revitalisasi merupakan upaya dalam memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagiankota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudia mengalami kemunduran/degradasi. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Menurut Danisworo dalam skripsi hertiningtyas caturini, pendekatan revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada tahap penyelesaian, akan tetapi harus dilengkapi dalam makna peningkatan ekonomi masyarakat serta

[28] Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi. *Pedoman Penulisan Skripsi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. (*Surabaya: UINSA Surabaya, 2016), hal 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilengkapi pengenalan budaya yang ada. Untuk mensukseskan kegiatan revitalisasi kawasan perlu adanya keterlibatan masyarakat yang bukan sekedar formalitas, namun masyarakat yang luas yang berperan aktif dalam mewujudkan cita revitalisasi. Tujuan Revitalisasi kawasan adalah meningkatkan vitalitas kawasan terbangun melalui intervensi perkotaan yang dapat menciptakan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, integrasi sitem kota, dan berwawasan budaya dan lingkungan.[29]

Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan termasuk sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat tersebut sehingga mampu diharapkan menambah nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. Revitalisasi kawasan berkaitan erat dengan intervensi fisik dengan kondisi visual khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, meliputi kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, ruang terbuka kawasan dan memperthatikan kondisi lingkungan dengan dampak jangka panjang. Dengan dilakukannya revitalisasi kawasan secara otomatis dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi informal maupun formal, dan dapat menciptakan lingkungan yang menarik, bukan sekedar beautiful place akan tetapi juga berdampak positif dalam kegiatan yang tercakup didalam satu kawasan.[30]

---

[29] Hertiningtyas Caturini, *"Revitalisasi Kawasan Dengan Pendekatan Responsive Environment Di Kota Tua Jakarta." (*Skripsi Universitas Bina Nusantara Jakarta tahun 2014), hal 30

[30] Sukoco Darmawan, "Revitalisasi Kawasan Pasar Ikan Sunda Kelapa Sebagai Kawasan Wisata Bahari Di Jakarta."*(* Skripsi Universitas Bina Nusantara Jakarta 2013), hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2 Asas dan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas dekonsentrasi, asas desentralisasi, dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi merupakan wewenang pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui pejabatnya dan tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat mengenai perencanaanm pelaksanaan, dan pembiayaan namun dalam pelaksanaannya melputi unsur vertikal dikoordinasikan kepala daerah dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat. Asas desentralisasi merupakan wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada dasarnya menjadi wewenang pemerintah daerah sepenuhnya. Kemudian Asas tugas pembantuan menyangkut kekuasaan pemerintah dalam penentuan kebijakan, namun dalam pelaksanaannya tetap di jalankan oleh pemerintah daerah.[31] Adapun urusan pemerintah daerah yang diberikan wewenang dalam mengurus urusan yang ada di daerah tersebut yang meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
e. Penanganan bidang kesehatan
f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

[31] Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota
i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota
j. Pengendalian lingkungan hidup
k. Pengendalian pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota
l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota
o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota
p. Pengurusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.[32]

2.3 Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang sering disingkat dengan PKL merupakan istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak, istilah ini ditafsikan kaki lima karena jumlah kaki adalah dua kaki dari pedagang dan ditambah tiga kaki dari gerobak yang sebenarnya adalah tiga roda atau bahkan dua roda ditambah satu penompang. Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan masyarakat yang berpenghasilan rendah terlebih menetapkan gaji harian dan mempunyia modal yang sangat terbatas. Menurut

[32] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karafir, pedagang kaki lima merupakan pedagang kecil yang berjualan di tempat umum seperti tepi jalan, taman, emperean toko dan pasar tanpa izin dari pemerintah.[33]

Secara definisi menurut pemerintah Indonesia, pedagang kaki lima adalah seorang yang menjalankan usaha perorangan yang melakukan penjualan barang dnegan menggunakan bagian jalan/trotoar atau tempat atau fasilitas kepentingan umum serta tempat yang bukan miliknya. Sebagaimana dikemukakan dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di bidang informal yang secara khusus pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki usaha dan berpindah-pindah.[34]

Pedagang kaki lima mempunyai keterbatasan internal maupun tantangan eksternal. Keterbatasan internal antara lain: Minimnya modal yang dipunya, rendahnya tingkat pendidikan, kurang akses terhadap kebijakan pemerintah terlebih dalam informasi, sarana ekonomi dan sosial.[35] Ciri-ciri yang menggambarkan pedagang kaki lima antara lain:

1. Merupakan kegiatan yang dilakukan secara informal
2. pola kegiatan yang tidak teratur baik dalam hal waktu dna permodalannya.
3. modal, peralatan dan perlengkapan serta omzet yang biasanya kecil

[33] Faried Ali, Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 186
[34] *Ibid*., hal 187
[35] Yusdi Gozali, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Alun-alun Brebes Kecamatan Brebes." (Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang), hal 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. pendapatan yang tidak menentu dan relatif rendah
5. tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam mengelola suatu produk
6. umumnya memperkerjakan tenaga dari lingkungan keluarga, kenalan, ataupun dari daerah yang sama.[36]

3. Kerangka Teori

3.1 Teori Konflik Rafl Dahrendorf

Dalam setiap kehidupan sosial, tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan, dan sebagainya. Makna dari konflik juga cenderung menimbulkan konotasi yang bernada ketakutan atau kebencian. Padahal konflik sendiri merupakan unsur sangat penting dalam proses pengembangan dan perbuatan. Konflik memang bisa berakibat buruk bahkan juga dapat merusak kehidupan individu seseorang, kelompok atau masyarakat. Namun, dengan adanya konflik, juga bisa menimbulkan solidaritas kekuatan yang konstruktif dalam hubungan kelompok. Konflik merupakan satu unsur penting dalam proses kelompok dan terjadi melalui cara-cara yang digunakan orang untuk berkomunikasi satu sama lain.[37]

Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam masyarakat. Teori Konflik merupakan suatu perspektif yang

[36] *Op, Cit*., hal 190
[37] Ikrom, "Konflik Prita VS RS OMNI Pembacaan Teori Dahrendorf: The Dialectical Conflict Theory." Jurnal at-Taqaddum, Vol 3, No2, November 2011, hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya atau memproleh kepentingan sebesar-besarnya. Dahrendorf telah melahirkan kritik penting terhadap kegagalan dalam menganalisa masalah konflik sosial. Dia menegaskan bahwa proses konflik sosial merupakan kunci bagi stuktur sosial. Konflik sosial merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Sehingga, banyaknya kajian mengenai teori konflik membutuhkan pemetaan agar lebih mudah untuk mengenal dan memahami berbagai teori konflik yang ada. Teori konflik Ralf Dahrendorf termasuk dalam teori konflik modern. Pada umunya, teori konflik modern cenderung bersifat kompleks dan muncul sebagai kritikan atas teori struktural fungsional.[38]

Menurut Asy'fiatul Adhimah dalam skripsinya, Ralf Dahrendorf mengawali pembahasan teori konfliknya dengan, dan banyak dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Bagi para fungsionalis, sistem sosial disatukan oleh kerja sama, sukarela dan konsensus umum. Namun bagi Ralf, masyarakat dipersatukan oleh "*kekangan yang dilakukan dengan paksaan*", sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar posisi di dalam masyarakat merupakan kekuasaan yang didelegasikan dan otoritas atas pihak lain.[39] Menurut Ralf Dahrendorf, pengelompokkan kelas didasarkan pada pemiliki modal, pengontrol modal, kelas menengah dan kelas bawah. Hal tersebut

[38] Asyfi'atul Adhimah, "Penggunaan Sumber Mata Air Curan Dan Konflik Pada Masyarakat Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban," (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019) hal 51
[39] *Ibid.*, hal 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi seiring dengan berkembangnya Kapitalisme yang terjadi hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa Ralf Dahrendorf berfokus pada pembagian kelas atas posisi dan otoritas yang dimiliki dalam masyarakat.[40]

Landasan teori yang dibangun oleh Ralf Dahrendorf mengacu pada separuh penolakan dan separuh penerimaan serta modifikasi teori sosial dari Karl Marx. Marx berasumsi bahwa kepemilikan dan kontrol dalam Kapitalisme berada di tangan individu yang sama, kaum industrialis dan borjuis berperan sebagai pemilik sekaligus pengendali segala sarana produksi. Dalam pemikiran Rafl Dahrendorf, Marx tidak memperhatikan pemisah antara pemilik dan pengendali sarana produksi yang pada abad 19 mengalami banyak perubahan besar, yakni adanya dekomposisi modal timbul dari berbagai korporasi dengan saham yang dimiliki banyak orang didalamnya. Sehingga dekomposisi modal ini mempersulit dalam mengidentifikasi kaum borjuis yang memiliki monopoli eksklusif atas modal maupun pengendali perusahaan. Selain itu terjadi juga dekomposisi tenaga kerja ditandai dengan lahirnya kelas pekerja berdasar pada susunan dimana para buruh terampil berada di jenjang atas sedangkan buruh biasa berada di bawah. Dalam hal ini kaum proletar tidak dapat dianggap sebagai massa tanpa perbedaan seiring dengan yang terjadi pada kaum borjuis namun, tersusun dalam sebuah hierarki kekuasaan yang kompleks.[41] Kedua proses tersebut mendorong tumbuhnya kelas menengah baru karena meningkatknya kesejahteraan pada (sebagian) kelas pekerja, terjadi juga mobilitas antar kelas dan tumbuhnya

[40] *Ibid*, hal 53
[41] Aniek Rahmaniah, "Teori Konflik: Ralf Dahrendorf". *UIN Maulana Malik Ibrahim*, hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan hak-hak sipil dan politik, serta meningkatnya peran pemerintah dalam berbagai bentuk retribusi pendapatan yang berguna dalam memantapkan kesejahteraan sosial.

Ralf Dahendorf juga mengkritik tentang teori struktural funsionalis yang diangggap gagal memahami masalah perubahan, teori ini bersiifat statis dan setiap elemen masyarakat hanya berperan sebatas menjaga stabilitas. Dalam tulisan Aniek Rahmania, Menurut Ralf, masyarakat cenderung mempunyai banyak sifat salah satunya adalah penyumbang terjadinya proses disintegritas dan perubahan, bahwa menurutnya masyarakat tertib juga karena adanya pemaksaan dari penguasa.[42] Menurut M. Wahid Nur Tualeka dalam jurnal teori konflik sosiologi klasik dan modern, Ralf Dahrendorf menilai konflik dalam sistem sosial tidak dapat dipisahkan karena didalmnya mengandung divergensi antar kelas dalam halnya kekuasaan (posisi) dan kewenangan (otoritas). Lebih dalam, Rafl juga memiliki pendirian bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik. Konsensus menekankan nilai integrasi dalam masyarakat. Wajah konflik menekankan pada kepentingan dan penggunaan kekerasan yang megikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Sehingga konflik tidak terjadi kecuali ada konsensus sebelumnya, dan konflik juga menimbulkan integritas

[42]M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." Jurnal Al-Hikmah, Vol 3, No. 1, Januari 2017, hal 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan konsensus dalam masyarakat. Ralf Dahrendorf berasumsi perbedaan distribusi otoritas menjadi faktor yang menentukan konflik sosial.[43]

Ralf Dahrendorf dipengaruhi pemikiran Max Weber dalam mengidentifikasi konsep kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan atau posisi diartikan sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan seseorang meskipun mendapat perlawanan. Kewenangan atau otoritas diartikan sebagai hak yang sah untuk mengharapkan kepatuhan. Konsep otoritas menyebutkan bahwa antara pemilik otoritas dan yang tunduk pada otoritas memiliki kepentingan yang bertentangan sehingga individu yang menyadari akan kepentingan kelasnya membentuk kelompok konflik kelas untuk mengubah struktur otoritas tersebut. Dalam analisis konflik Ralf Dahrendorf, analisis konflik pertama adalah mengidentifikasi konflik antar-posisi sosial dan otoritasnya dalam masyarakat yang tersusun dari sejumlah unit. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi sosial. Otoritas yang melekat pada posisi sosial adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf dalam hal ini yang dimaksud dalam Otoritas merupakan superordinasi dan subordinasi. Otoritas itu tidak konstan karena ia terletak dalam posisi serta terbatas pada ruang dan waktu. Dengan kata lain, individu yang memiliki otoritas di satu tempat (superordinat) belum tentu memiliki hal yang sama di tempat lain (subordinat).[44] Hubungan otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi, sehingga hanya ada dua kelompok kepentingan

[43] *Ibid.*, hal 9
[44] *Op,Cit.*, hal 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang saling bertentangan dalam setiap asosiasi yaitu antara kelompok kepentingan yang berupaya untuk mempertahankan status quo, sedangkan kelompok kepentingan lainnya berupaya untuk mengadakan perubahan. [45]

Selain membahas mengenai hubungan posisi dan otoritas. Dalam analisa konflik Ralf Dahrendorf membedakan tiga tipe utama kelompok sosial yaitu kelompok semu (*quasi group*) atau sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok kepentingan, dan kelompok konflik. Dengan dikategorikan kelompok dalam teori Ralf Dahrendorf menganalisa hubungan konflik dengan perubahan. Ada banyak kelompok kepentingan yang berusaha memengaruhi pemerintah demi keuntungan kepentingannya sendiri. Mereka antar alain adalah pengusaha dan organisasi bisnis, asosiasi profesional, organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi agama, kelompok isu, dan organisasi lingkungan. Dalam buku paradigma ilmu politik karangan Prof. Kacung Maridjan, Gabriel almond mengidentifikasikan empat macam tipe kelompok kepentingan : anomik, non-asosiasional, isntitusional, dan asosiasional.[46]

a) Anomic : merupakan kelompok spontan dengan tujuan bersama untuk merespon frustasi tertentu, kelompok ini cenderung mempunyai keterampilan komunikasi politik yang rendah. Kelompok ini berhubungan dengan trobosan spontan ke dalam sistem politik, seperti kerusuhan dan demonstrasi

[45] Ikrom, "Konflik Prita VS RS OMNI Pembacaan Teori Dahrendorf: The Dialectical Conflict Theory," Jurnal at-Taqaddum, Vol 3, No2, November 2011, hal 4

[46] Kacung Marijan, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hal 1210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Non-asosiasional : kelompok yang jarang diorganisasikan dengan baik, dan kativitas mereka bergantung pada isu spesifik. Berbeda dengan anomic dalam hal mempunyai keanggotaannya yang sama dan memiliki identitas sama.

c) Institusional : kelompok yang paling formal dan memiliki fungsi politik atau sosial selain kepentingan khusus mereka.

d) Asosisasional : kelompok yang mencakup wangsa (keturunan), etnis, regional, agama, status, dan kelompok kelas sosial. Kelompok ini menggambarkan kelompok spesial seperti serikat perdagangan, organisasi bisnis, organisasi profesional, dan organisasi pendidikan. Mereka dibentuk atas dasar merepresentasikan kepentingan suatu kelompok.

Kelompok kepentingangn mempunyai tujuan dibentuknya kelompok ini, sebagai representasi diri dalam rangka memenuhi agenda politik. Mereka mendidik anggota kelompok, publik umum, dan politisi yang membantu menarik perhatian banyak orang terhadap isu spefisik dan mengwasi serta mengevaluasi program yang berjalan. Kedua, mereka menjadi evaluator program bertindak dalam kapasitas tidak resmi, dan memastikan kepentingan mereka terlayani. Kemudian kelompok kepentingan bisa membantu menempatkan isu ke agenda legislatif, mereka bisa membantu agensi menyusun peraturan, dan membawa ke ranah hukum seperti Mahkamah Agung.[47]

[47] *Ibid.*, hal 1212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik hanyalah satu bagian realitas sosial. Konflik juga mengakibatkan perubahan dan perkembangan. Segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang melakukan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik itu disertai dengan tindakan kekerasan maka akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Di bawah kondisi yang ideal tak ada lagi variabel lain yang diperlukan. Tetapi, karena kondisi tak pernah ideal, maka banyak faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial.[48]

3.2 Teori Revitalisasi

Revitaliasi adalah upaya dalam memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang pernah hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Rais dalam tulisan skripsi Miftah Lutfie Darayu, tahapan revitalisasi dapat dibagi dan membutuhkan kurun waktu tertentu yang meliputi hal terkait:

1. Intervensi fisik, proses yang mengawali kegiatan secara fisik merevitalsiasi dan dilakukan bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, ruang umum terbuka hijau, dan ruang terbuka kawasan.
2. Rehabilitasi Ekonomi, revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan urban yang harus mendukung kegiatan ekonomi pada

[48] Miftah Lutfie Darayu. "Revitalisasi dan Perencanaan Tapak Sempadan Sungai Cikapundung Tengah dengan Konsep Waterfront City", (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia), hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawasan tersebut, terbilang bahwa perbaikan fisik dapat mengangkat kegiatan ekonmi informal dan formal sehingga mampu memberi nilai tambah pada kawasan kota. Adanya dorongan baru untuk menciptakan efektif keselarasan faktor fisik dan faktor ekonomi pada satu wilayah.

3. Revitaliasi Sosial, merupakan sebuah keberhasilan kawasan yang diukur dengan penilaian jika mampu menarik perhatian masyarakat yang pada aspeknya tidak hanya pada tempat yang indah/nyaman, akan tetapi juga berdampak baik bagi masyarakat yang memakai kawasan tersebut maupun citra perkotaan.[49]

Teori yang dicetuskan Kevin Lynch tentang *Image Of City* berisi tentang mempelajari fisik yang terlihat maupun yang memiliki makna sosial di dalam daerah trtentu, fungsinya, sejarah, atau bahkan dari namanya. Mengulas pada persoalan bentuk yang terlihat dan diambil sebenarnya harus dipelajari guna memperkuat makna dan tidak meniadakan makna yang sudah ada sebelumnya. Diklasifikasikan dengan lima jenis elemen: *Paths, Edges, distrcts, nodes,* dan *landmarks*.

1. *Paths* (Jalur): merupakan saluran atau jalur penghubung dan jalur sirkulasi manusia serta kendaraan dari sebuah ruang ke ruang lain dalam kawasan. *Paths* terdiri atas internal akses dan eksternal akses yang menjadi penghubung wilayah dengan wilayah lainnya yang lebih luas.

[49] *Ibid.*, hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Nodes* (Simpul): merupakan pertemuan beberapa jalan yang ada di kota, sehingga membentuk ruang tersendiri. Biasanya bangunan yang yang berada pada sumpul sering dirancang secara khusus untuk memberikan citra atau identitas ruang. *Nodes* adalah suatu pusat kegiatan fungsional bahwa sesuatu terjadi di tempat ini dimanan penduduk memenuhi kebutuhan hidup.
3. *Districk* (Kawasan): merupakan area kawasan dalam skala dua dimensi yang memiliki ciri khas yang mirip.suatu daerah memiliki ciri yang sama dan memberikan citra yang sama. Zona-zona dalam kawasan dapat dicontohkan sebagai tempat utama dari aktiivtas perdagangan, hiburan-hiburan, dan fungsi lainnya.
4. *Landmarks* (Tangeran): merupakan citra suatu kawasan yang dapat memberikan kesan dari masyarkat tehradap suatu ruang sehingga mudah diingat dan dapat memberikan orientasi orang dan kendaraan untuk bersirkulasi.
5. *Edges* (Tepian): bentukkan massa bangunan yang berguna sebagai batasan ruang dalam kawasan. Ruang yang terbentuk tergantung kepada kepejalan dan ketinggan massa. Berfungsi sebagai pemutus linier contohnya pantai, tembok, batasan lintasan, dan sebagainya.[50]

[50] Sukoco Darmawan, "Revitalisasi Kawasan Pasar Ikan Sunda Kelapa Sebagai Kawasan Wisata Bahari Di Jakarta", (Skripsi Universitas Bina Nusantara Jakarta 2013), hal 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.3 Teori Kebijakan Publik

3.3.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kegiatan tersebut mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Para ilmuwan politik mempunyai perhatian serius dalam mengkaji studi kebijakan publik. Alasan dalam mempelajari kebijakan publik didasari oleh alasan ilmiah, karena kebijakan publik dapat dipelajari sebagai pengetahuan tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi bagi masyarakat yang menjalankannya. Alasan tersebut diwujudkan untuk mengetahui fakta-yang membantu membentuk suatu kebijakan dan konsekuensi apa yang akan timbul dan didapatkan masyarakat. Alasan selanjutnya adalah sebagai alasan profesional, dimana para ilmuwan dapat membantu menentukan kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya dijadikan prioritas rumusan sesuai dengan apa yang ada dipikirannya, tentunya pengetahuan yang mendasarkan pada fakta merupakan prasyarat dalam menentukan dan memahami permasalahan sosial. Kemudian alasan selanjutnya bahwa para ilmuwan politik tertarik pada studi kebijakan ialah dengan alasan politik. Bahwa studi kebijakan membahas terkait apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengambil keputusan yang layak dan mencapai tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tepat, karena lahirnya kebijakan yang benar dan tepat merupakan lahirnya ciri-ciri perbaikan kebijakan politik.[51]

James Anderson secara garis besar dalam buku karangan Budi Winarno, membuat konsep kebijakan publik mencakup tahap-tahap besar yaitu perumusan masalah, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan kebijakan mempunyai tujuan untuk mempermudah dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik antara lain :

1. Tahap penyusuan Agenda

   Para wakil menempatkan masalah pada agenda publik yang sebelumnya masalah-masalah ini berkompetensi untuk menjadi prioritas dan dapat masuk ke agenda perumusan kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan

   Masalah yang masuk kedalam agenda penyusunan kebijakan akan dibahas oleh wakil pembuat kebijakan, masalah yang diidentifikasi kemudian dicarikan pemecahan masalah terbaik yang berasal dari alternatif yang ada. Pada tahapan ini masing-masing aktor akan mencarikan formulasi atau tindakan alternatif untuk memecahkan permasalahan.

3. Tahap adopsi kebijakan

   Merupakan tahapan untuk menentukan alternatif kebijakan yang sudah banyak ditawarkan oleh perumus kebijakan dan diadopsi

[51] Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo, 2002), hal 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dukungan lembaga legislatif dan konsensus antar lembaga lainnya.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

   Alternatif yang dipilih akan dijadikan kebijakan, serta kebijakan ini dijalankan degan unit-unit administarsi yang memobilisasi sumberdaya baik finansial dan manusia

5. Tahap Penilaian Kebijakan

   Tahapan ini dilakukan setelah dan sedang kebijakan berjalan, sejauh mana kebijakan yang diciptakan dapat memecahkan sebuah permasalahan dan mendapatkan dampak yang diinginkan.[52]

Menurut Nugroho menegaskan bahwa kebijakan publik di Indonesia memiliki tingkatan yang jika dikelompokkan menjadi tiga tingkatan kebijakan. Pertama, kebijakan publik yang bersifat *makro* atau kebijakan mendasar dan pembahasan umum seperti UUD 1945. Kedua, kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menegah, atau kebijakan yang bersifat penjelas pelaksanaan sepeti Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Ketiga, kebijakan publik *mikro* yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya.[53]

3.3.2 Konsep Implementasi Kebijakan

implementasi Kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang diteliti pada tingkat program tertentu. Proses

[52] *Ibid.*, hal 30

[53]Nadia Sasmita, Pengertian, "Jenis-jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik." Jurnal Kebijakan Publik Oktober 2013, hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implementasi akan dimulai jika tujuan dan sasaran program ditetapkan, program ini disusun dengan dana yang telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran kebijakan publik. Tugas adanya implementasi kebijakan adalah membangun jaringan yang memungkingkan tujuan dari kebijakan publik dapat direalisasikan secara tepat dan benar melalui aktivitas intansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak non pemerintah, seperti pihak swasta, dan keterlibatan masyarakat yang berkepentingan.[54] Abdul wahab menjelaskan implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan publik, yang biasanya berbentuk undang-undang atau berbentuk peraturan dan perintah keputusan eksekutif, keputusan itu mempunyai sifat mengidentifikasi masalah, menyebutkan secara jelas tujuan yang ditetapkan dalam suatu program, dan mengatur jalannya kebijakan yang sudah ditetapkan.[55] Implementasi merupakan proses dalam perwujudan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik agar menjadi kenyataan. Pengordinasian tujuan tersebut berbentuk perundang-undangan. Dengan kata lain implementasi kebijakan berkaitan dengan manusia, degan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, dan sebagainya. Anderson merumuskan bahwa dalam mengimplementasi kebijakan ada empat aspek yang perlu diterapkan, yaitu: siapa yang dilibatkan dalam proses implementasi, hakikat dalam proses administrasi, keputusan atas dasar kebijakan tersebut, dan efek atau dampak dari implementasi.[56]

---

[54] Imronah, "Implementasi Kebijakan: Perspektif Model, dan Kriteria Pengukurannya", hal 3
[55] *Op,cit.*, hal 55
[56] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Bandung: ALFABETA, 2014), hal 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku karangan Arifin Tahir dnegan judul kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, George C. Edward III menawarkan setidaknya ada empat faktor yang dalam mengimplementasikan kebijakan publik adalah *communication, Resourches, Dispotition or Attitude, bereaucratic structure*. Keberhasilan diperoleh ketika implementator memahami apa yang seharusnya dilakukan disetiap tujuan kebijakan haruslah disosialisasikan kepada masyarakat atau kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distrosi implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan juga membutuhkan sifat aktif sumberda manusia dan sumberdaya finansial untuk menjalankan kebijakan.

1. Faktor komunikasi, adanya komunikasi yang tepat akan berdampak pada implementasi kebijakan secara efektif. Jika implementasi kebijakan yang disusun oleh pembuat kebijakan tidak mempunyai tujuan secara jelas akan terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk dalam kebijakan tersebut. Faktor komunikasi menjadi penting karena menunjukkan peran agar para pelaksana kebijakan mengetahui persis informasi yang didapatkan dan mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, adanya komunikasi merupakan syarat utama agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik adalah mereka yang mengerti apa yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukannya komunikasi yang baik, para pelaksana akan mengalami kesulitan tindakan yang harus dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan atau kualitas yang ada pada pelaksana kebijakan. Sumber daya dalam organisasi meliputi kualitas individu, kapasitas organisasi, jumlah, dan kewenangan yang dimiliki. Faktor ini menjadi acuan karena bagaimanapun sumber daya akan mempengaruhi jelas dan konsistennya ketentuan maupun kebijakan agar dapat berjalan secara efektif dan tidak terjadi kesalahan. Terlebih lagi dalam perumusan kebijakan faktor sumber daya menjadi penting dalam mempengaruhi proses implementasi program.
3. Faktor Sikap Pelaksana, pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melakukannya tetapi mereka harus mempunyai keinginan untuk juga menyelenggarakan dan mesukseskan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana menjadi faktor penting ketiga yang diajukan George C. Edward III ini menyoroti sikap para pelaksana kebijakan yang akan berdampak pada cara pandang terhadap kebijakan itu sendiri dan bagaimana mereka melihat kebijakan tersebut sebagai keuntungan perorangan atau organisasi mereka.
4. Faktor struktur birokrasi, adanya fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan untuk menjalankan kompleksitas implementasi yang pada hakikatnya membutuhkan kerjasama apik dengan banyak organisasi dan pemangku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan. Jika terjadi fragmentasi organisasi akan menghambat efektifitas dan menutup kesempatan dalam menciptakan kebijakan yang dicita-citakan.[57]

3.3.3 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan mempunyai tujuan untuk melihat sebab-akibat kegagalan suatu kebijakan atau malah berhasilnya suatu kebijakan, dalam bahasa yang mudah bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai kemanfaatan dari sebuah kebijakan yang diterapkan. Lester dan Stewart membedakan evaluasi kebijakan menjadi dua tugas. Tugas pertama merujuk pada cara untuk melihat kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah malah meleset pada tujuan kebijakan. Lalu tugas kedua sebagai penilai apakah suatu kebijakan tersebut dalam meraih dampak atau tujuannya dapat dijadikan pedoman untuk mengubah atau memperbarui kebijakan untuk masa mendatang. Dalam melakukan evaluasi kebijakan dilakukannya spesifikasi permasalahan berguna untuk mengidentifikasi tujuan atau kriteria program kebijakan yang akan dievaluasi, melakukan pengukuran sebagai aktivitas pengumpulan informasi untuk mengevaluasi obyek, melakukan analisis sebagai penggunaan informasi yang sudah dihimpun untuk mencari sebuah kesimpulan, serta rekomendasi sebagai penentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut.[58]

---

[57] *Ibid.*, hal 70

[58] Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo, 2002), hal 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam jurnal muatan Poni Suakasih, James Anderson membuat tipe-tipe evaluasi kebijakan publik dan membaginya menjadi tiga tipe. Tipe pertama, bahwa evaluasi kebijakan dipahami sebagai fungsional, para pembuat kebijakan akan selalu memikirkan pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan tersebut yang didasari oleh faktor ideologis; tipe kedua dalam evaluasi adalah memfokuskan diri daripada bekerjanya kebijakan, evaluasi tipe ini lebih membincangkan mengenai kejujuran atau efisiensi dalam menjalankan program; tipe ketiga merupakan tipe evaluasi kebijakan sistematis. Tipe ini melihat secara obyektif program-program kebijakan untuk mengukur dampak yang dirasakan masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan kebijakan tersebut tercapai dan menjawab keinginan masyarakat dari produk kebijakan. Evaluasi ini akan memberikan pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di masa mendatang.[59]

Evaluasi Dampak merupakan salah satu cara yang dilakukan evaluator dalam melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi menyangkut pada proses penjelasan suatu produk kebijakan yang diciptakan pemerintah, kemampuan dalam menganalisis dalam memperbaiki masalah sosial, dan menyangkut konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan atau yang disebut dengan *feedback*. Terdapat lima dimensi analisis dalam membicarakan evaluasi.

[59] Poni Sukasih, "Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.", hal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dampak kebijakan pada masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Maksud dari dampak kebijakan ini adalah masyarakat atau kelompok sosial yang sudah ditentukan yang dapat dipengaruhi oleh suatu kebijakan, dalam suatu kebijakan mungkin mempunyai konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan sehingga suatu program diciptakan untuk menentukan sasaran masyarakat yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.
2. Dampak kebijakan juga mungkin akan berimbas pada kelompok yang diluar sasaran dan tujuan kebijakan. Kebijakan ini disebut eksternalisasi atau dampak melimpah (*externalities or spillover effects*), eksternalisasi dapak berdampak positif dan juga berdampak negatif.
3. Munculnya suatu kebijakan akan berdampak pada kondisi sekarang dan kondisi yang akan datang. Apakah suatu program direncanakan untuk memperbaiki keadaan secara jangka pendek atau jangka panjang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur lain, yaitu biaya langsung yang dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Hal ini berkaitan dengan bagaimana efektivitas suatu kebijakan publik tersebut dijalankan dengan biaya yang sudah dikeluarkan.
5. Evaluasi juga menyangkut pada biaya tidak langsung yang ditanggung masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

evaluator akan mengukur keuntungan dari program kebijakan publik. Dampak dari kebijakan dapat dibedakan dengan dua sifat, yaitu simbolik dan materi. Simbolik meyangkut penegasa terhadap nilai para elit, pernyataan elit dalam kebijakan publik bergantung besar kepada kepercayaan masyarakat, dan aspirasi untuk keefektivifannya, secara ideologis emosional memberikan kepuasan bagi banyak orang. Dalam suatu kasus tindakan kebijakan seolah-olah ditujukan untuk mencapai kebutuhan bersifat materi akan tetapi justru hanya bersifat simbolik. Sedangkan dampak kebijakan bersifat materi yaitu merujuk pada keuntungan-keuntungan yang didapatkan dalam kebijakan tersebut.[60]

[60] *Op, Cit.,* hal 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kerangka Berpikir

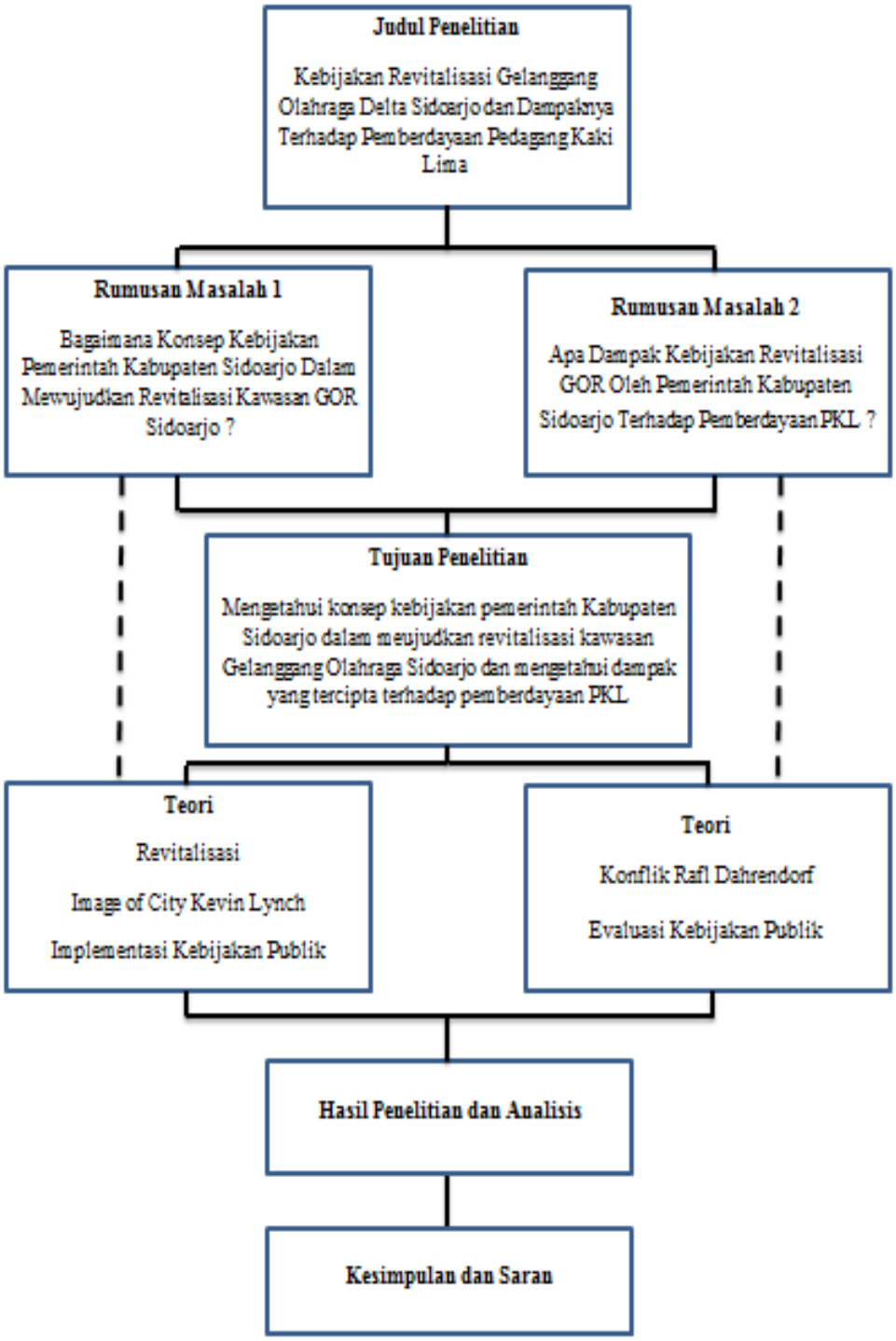

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian pada rancangan penelitian menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat fenomenologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut sebagai metode interpretative karena data lebih berkenaan dengan hasil yang ditemukan dilapangan. Metode kualitatif digunakan agar mendapatkan data secara mendalam, sebuah data yang mengandung makna, dengan demikian peneltian kualitatif mengacu pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti obyek secara alamiah dimana baik tidaknya hasil dari sebuah penelitian tergantung pada peneliti yang menyusun instrumen kunci, teknik dalam memperoleh data, melakukan analisis data yang bersifat induktif. Penelitian kualitatif menurut Creswell merupakan cara untuk menjelajahi atau memahami makna idividu atau kelompok sosial dalam menganggap masalah sosial atau manusia.[61] Jenis Penelitian ini mengangkat metode kualitatif *case study*, yaitu peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih kemudian menghadirkan teori untuk memudahkan prediksi penjelasan tingkah laku dan sebagai kontrol terhadap situasi bagi pihak yang

[61] Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan suatu teori. Peneliti melakukan pengumpulan data secara detail dengan menggunakan prosedur berupa observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan melakukan studi dokumen.[62]

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo karena permasalahan yang berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo terjadi pada tahun 2019 hingga sekarang. Selain itu juga memuat berbagai pertimbangan atas pemilihan lokasi masalah antara lain :

1. Pada tahun 2006 Bupati Sidoarjo mempunyai rencana strategis dalam pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang tekena dampak bencana lumpur lapindo agar dapat menjadi masyarakat yang menguasai praktik ekonomi kreatif melalui penjualan produk pasar dan menjadi pedagang kreatif lapangan atau yang disebut sebagai PKL di pusat keramaian kota. Para pelaku usaha memilih menjadi PKL agar produk yang mereka punya dapat dilihat oleh masyarakat yang melintas. Semakin menjamurnya jumlah PKL mengakibatkan taman kota menjadi kumuh, hal ini tidak dibarengi dengan kebijakan yang efektif dalam penataan para PKL, dimana kebijakan yang diambil pada saat itu hanyalah melakukan pemindahan PKL di lokasi sementara yang itu dinilai hanya sebagai pemindahan masalah bukan penyelesaian masalah

[62] Burhan Bungin, *Metode PenelitianSosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hal 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas penataan PKL di Kabupaten Sidoarjo termasuk para PKL yang berada di kawasan GOR Delta Sidoarjo.

2. Adanya rencana Pemerintah merevitalisasi untuk mengindahkan kembali kawasan GOR Delta Sidoarjo melalui pendirian gerbang dan pagar besi, serta Pemerintah memberikan kebijakan terkait pemberlakukan jam operasional di kawasan GOR yang membuat para PKL menjadi kelompok sosial terdampak yang mengalami defisit pemasukan. Dampak dari pendirian gerbang pintu masuk dan memberlakukan jam operasional membuat kebanyakan pembeli tidak mengambil langkah repot untuk mendapatkan barang yang dibelinya, dan berdampak pada target penjualan produk PKL. Hal tersebut dapat dinilai sebagai tindakan Marginalisasi kepada para PKL karena keberadaannya tidak diakui dan tidak diberi perhatian termasuk masalah penetapan lokasi untuk mereka berdagang.
3. Inisiasi untuk audiensi yang dilakukan oleh komunitas Seven Gab LSM yang mempunyai fungsi sebagai lembaga kontrol pemerintah dan para PKL dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya urgensi bahwa para PKL mempunyai sikap aktif dalam menolak kebijakan atas revitalisasi GOR Delta Sidoarjo, sampai saat ini para PKL merasa belum disejahterakan atas kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo termasuk mengatasi permasalahan PKL dan melakukan pemberdayaan bagi PKL agar kegiatan sehari-hari mereka sebagai pedagang tidak dipandang negatif. Tuntutan yang dilayangkan oleh para PKL adalah mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memberdayakan usahanya, serta adanya kebijakan yang menguntungkan bagi kedua pihak yaitu PKL dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam metode kualitatif disebut dengan Narasumber atau informan. Peneliti mempunyai harapan besar terhadap data yang akan diberikan oleh informan sebagai data primer dan data skunder, mengingat informan merupakan mereka yang terpilih dalam memberikan informasi dan pelaku yang terlibat atau yang mendapatka dampak dalam permasalahan atau agenda sosial, dalam implementasi kebijakan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan upaya revitalisasi terhadap disfungsi Kawasan Gelanggang Olahraga Delta Kabupaten Sidoarjo yang digunakan oleh para PKL menjadi lahan jual-beli dan mematikan fungsi asal dari GOR sebagai tempat sarana berolahraga bagi masyarakat. Subyek penelitian yang dipilih untuk menggali data dalam permasalahan proses revitaliasi kawasan GOR Delta Sidoarjo dibagi menjadi dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang pemilihan subyek penelitian dijabarkan sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer:
   a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, dipilih atas fungsinya sebagai penyambung aspirasi rakyat sekaligus sebagai obyek atau sasaran audiensi dengan PKL di kawasan GOR Delta yang telah di fasilitasi oleh Seven Gab LSM Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dipilih atas dasar fungsi perumusan dan penetapan kebjakan teknis di bidang olahraga dan pariwisata. Termasuk dalam kegiatan memperindah wajah GOR Delta Sidoarjo melalui pembangunan Pagar besi berbentuk orang berlari, memberlakukan jam opersional, dan membangun pos keamanan.

c. Ketua PKL di kawasan Gor Delta Sidoarjo dan PKL yang dipilih melalui kualitas informasi dan kesertaannya dalam aksi demo mewakili perasaan dan keinginan para PKL sebagai kelompok sosial yang terkena dampak dari kebijakan revitalisasi Gor Delta Sidoarjo.

2. Sumber Data Sekunder:

a. Seven Gab LSM (Komunitas Tujuh Gabungan LSM) yang terdiri dari LSM yang berada di Kabupaten Sidoarjo, dipilih atas fungsinya sebagai lembaga kontrol pemerintahan serta sebagai mediator antara PKL dan Pemerintah. Selain itu, Seven Gab LSM ini juga merupakan fasilitator diadakannya audiensi antara PKL dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait permasalahan revitalisasi kawasan GOR Delta.

b. Masyarakat, merupakan subyek yang dipilih atas dasar mereka yang datang dan membeli produk yang diperjualbelikan oleh PKL, serta masyarakat yang datang untuk melakukan aktivitas olahraga di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Informasi yang didapat digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui sikap masyarakat atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap revitalisasi GOR Delta Sidoarjo.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitan yang akan dilakukan yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan Tahap analsis data, sebagai berikut:

3.1 Tahap Pralapangan

Ada enam tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pralapangan. Pertama, menyusun rancangan penelitian dimana peneliti harus memahami atas segala metode dan teknik penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang bermutu dan bermanfaat. Kedua, memilih lapangan penelitian karena setiap situasi kehidupan merupakan laboratorium atas lapangan penelitian kualitatif. Ketiga, mengurus perizininan penelitian, berfungsi agar siapa saja dapat memberikan akses secara terbuka sesuai yang dibutuhkan oleh peneliti, adanya perizinan penelitian akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data karena penelitian sudah diberikan izin oleh pemerintahan setempat. Keempat, Menjajaki lapangan penelitian yaitu peneliti mencoba mendapatkan berbagai informasi terkait dengan situasi lapangan penelitian sehingga kedatangan peneliti dalam lapangan tidak dengan tangan hampa atau tanpa arah untuk menyelesaikan penelitian. Kelima, setelah melakukan pengamata atas lapangan, peneliti memfokuskan diri dalam memilih dan memanfaatkan informan sehingga data-data yang ingin diperoleh sesuai dengan kemampuan informan untuk menyajikan atau memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi. Keenam, persiapan perlengkapan penelitian dilakukan jika dirasa tema penelitian bisa dilakukan dan dapat diakses oleh peneliti, maka peneliti mempersiapkan segala suatu hal yang berkaitan dengan penelitian.[63]

3.2 Tahap Kerja Lapangan

Dalam tahap kerja lapangan peneliti mempersiapkan diri dan memahami latar penelitian yang akan dijelajahi. Peneliti mempersiapkan mental, fisik, dan etika Sehingga peneliti memahami posisi sebagai peneliti yang berada di lingkungan objek. Penelitian dilakukan dengan latar tertutup, yakni pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam sehingga hubungan antar informan akan cukup dekat dan terbuka. Peranan peneliti benar-benar dibutuhkan untuk menghidupkan komunikasi yang baik dengan subjek sehingga pandangan mereka pada peneliti akan dinilai baik, tetapi peneliti tetap selektif dalam melakukan pertukaran informasi data untuk menjamin kegiatan penggalian data berlangsung efektif. Penampilan juga menjadi pertimbangan dalam melakukan tahap kerja lapangan, peneliti harus menyesuaikan dengan siapa yang dihadapi, menerapkan penampilan yang sesuai dengan subyek sehingga tidak merasa tertekan atau membuat informan merasa tidak nyaman saat dilakukannya penggalian data. Juga peneliti tetap memperhatikan waktu dan kondisi yang ada dilingkungan saat dilakukannya penggalian data, hal ini merupakan antisipasi peneliti agar

[63] Lexi J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2014), hal 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terlalu dalam membahas tentang kehidupan subjektif informan yang itu akan merusak fokus penelitian.[64]

3.3 Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan kegiatan peneliti untuk melakukan analisis data yang diperoleh. Setelah peneliti melakukan catatan lapangan, mengumpulkan data yang diperoleh dari informan penelitian. selanjutnya peneliti memproses daya untuk mencari dan menyusun data secara sistematis agar informasi dapat dipahami dan dapat diakses oleh orang lain terkait dengan keilmuannya. Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh yang dikembangkan menjadi hipotesis, kemudian dirumuskan lagi sehingga hipotesis tersebut benar-benar teruji dan dapat disimpulkan. Proses analisis data dilakukan dengan memahami seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber. Setelah data sudah dianalisis, peneliti melakukan keabsahan data guna agar data yang disajikan benar-benar data yang kredibel dan bersifat substantif.[65]

[64] *Ibid.*, hal 139
[65] U Shilalahi. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hal 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode sebagai berikut:[66]

1. Observasi

   Observasi merupakan kegiatan pengamatan suatu obyek secara langung maupun tidak langsung agar memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian, terjun secara langsung ke lapangan dan terlibat seluruh pancaindra. Dengan melakukan observasi peneliti lebih mampu memahami konteks persoalan dan situasi yang tercipta, sehingga pengalaman langsung akan menghasilkan pandangan induktif yang tidak terpengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Hasil observasi akan mendapatkan unsur-unsur ruang, pelaku, kegiatan, obyek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu atau urutan peristiwa, dan tujuan, hasil observasi akan menghantarkan pada penyusunan pemikiran terhadap suatu permasalahan yang ada.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang didapatkan melalui tatap muka antara peneliti dan informan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara mendalam atau *In-Depth Interview.* Mc.Millan dan Scumacher menjelaskan bahwa wawancara secara mendalam merupakan tanya jawab secara terbuka untuk memperoleh data, sebagaimana yang mereka rasakan atau menyatakan

[66] Ismail Nawawi Uha, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwi Putra Pustaka, 2012), hal 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat dan perasaannya tentang kejadian penting dalam hidupnya. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui lebih dalam tentang partisipan menginterpretasikan dalam situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan dalam kegiatan observasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari sumbernya, sehingga menambah keyakinan peneliti bahwa data yang disampaikan adalah data yang benar. Peneliti memilih melakukan wawancara secara Semi Standart, jenis wawancara *in-depth interview* dimana pelaksanaannya wawancara *disetting* bebas dalam kontrol *interviewer*, dengan melakukan wawancara tersebut, dimaksudkan agar menemukan permasalahan atau data secara terbuka dan tidak kaku, dimana pihak informan diminta pendapat, dan ide-idenya, dengan ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.

3. Kajian Literatur

   Kajian literatur merupakan data pendukung dalam metode kualitatif, data yang didapatkan akan membantu keabsahan obyek penelitian. Kajian literatur dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dan menganalisa suatu kejadian pada obyek penelitian.

4. Dokumentasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen merupakan catatan fenomena, peristiwa, yang sudah berlalu yang dikumpulkan dalam bentuk tulisan atau gambar. Sesuai dengan krakteristik metode penelitian kualitatif bahwa paradigma yang diangkat adalah fenomonologis dan bersifat holistik. Studi dokumen merupakan pelengkap metode observasi dan wawancara, diharapkan dokumen-dokumen yang tersedia atau yang akan didapatkan mampu mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian, karena hasil observasi dan wawancara akan lebih kredibel jika adanya dokumen pendukung penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualiatif adalah analisa deskriptif, yang dilakukan penyusunan kategori yang sesuai dengan kualifikasi, kemudian dihubungkan dengan kategori yang lainnya sehingga membentuk tipologi yang berhubungan dengan teoritis.[67] Menggunakan analisis data model Miles dan Huberman dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis jawaban yang dilontarkan oleh informan, sehingga jika informasi yang didapatkan masih belum mencapai ketentuan, maka peneliti akan mencoba menggali data hingga mendapatkan informasi yang kredibel. Miles dan Huberman mengatakan bahwa proses penggalian data dilakukan secara interaktif dan berlangsung

[67] Ismanto Setyabudi, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta, 2015), hal 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terus menerus hingga data yang diperoleh sudah jenuh.[68] Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dari fenomena lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang terperinci. Laporan direduksi, dirangkum, dipilih hal yang bekaitan dan dianggap penting atas tema dan permasalahan atau persoalan. Laporan lapangan bersifat mentah kemudian direduksi, disusun secara sistematis agar mudah dipahami terhadap hasil pengamatan.
2. *Display* Data, melakukan pemetaan atas kategori data, pengklasifikasian agar data dapat dilihat secara keseluruhan sehingga peneliti dapat menguasai pemetaan dan tidak tenggelam dalam data. Peneliti melakukan pengkodean gagasan secara kategoris, hal ini akan mempermudah peneliti dalam mencari data yang diperlukan dan membuang data yang dirasa terlalu jauh dengan pokok permasalahan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, setelah melakukan reduksi data dan dsiplay data, peneliti mengumpulkan data dan mencari hubungan persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan atau penyajian data diperoleh dari pernyataan subjek dengan makna yang ada pada konsep pemikiran atas dasar masalah sosial. Verifikasi dilakukan dengan tujuan agar data yang disajikan terkandung dalam konsep dasar penelitian lebih tepat dan bersifat objektif.[69]

---

[68] Uha, *Op.Cit*., hal 305

[69] H. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora* (yogyakarta: PARADIGMA, 2012), hal 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Adanya pengecekan keabsahan data adalah untuk menghindari kekeliruan data yang diperoleh, sehingga perlu adanya pembenaran atau pengecekan secara berulang agar data yang disimpulkan mempunyai nilai kepercayaan yang tinggi. Berikut peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan beberapa cara antara lain:[70]

1. Uji kredibilitas, peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan waktu yang cukup lama, melakukan pengamatan secara serius dan meningkatkan ketekukan dalam mencermati data di lapangan.
2. Uji *dependability*, melalui audit atas keseluruhan proses yang sudah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian akan diaudit oleh tim auditor atau pembimbing dalam melihat seluruh aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak dapat menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh auditor pada realita lapangan, maka patut diragukan dalam pengumpulan data dan penyajian data yang dilakukan oleh peneliti.
3. Trianggulasi sumber data, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber data satu sama lain atau membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian, mengulang klarifikasi dengan aneka sumber. Dilakukan trianggulasi sebagai alat uji kebenaran data dan menjadikan data lebih kaya informasi, menjadi sarana memperkuat kekuatan teori, metodologi, dan interpretasi data dalam penelitian, serta

[70] Ela Sutriani, dkk. *"Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data." STAIN Sorong*, hal 14-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi.[71] Melakukan trianggulasi data juga melihat sumber data dari faktor orang atau informan yang dapat dijadikan acuan data sebagai perwakilan kelompok kerja/ kelompok sosial tertentu yang bersangkutan dalam kebijakan revitalisasi kawasan GOR Delta Sidoarjo, melakukan pengecekan data dari faktor waktu yakni dengan melihat kebaruan data yang diperoleh, semakin baru data yang diperoleh semakin efektif dalam menguji kebenaran data dengan realitas permasalahan.

4. *Checking* data, dilakukan dengan maksud peninjauan kembali atas persetujuan informan dalam menyampaikan informasi untuk dipublikasikan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atas dasar gugatan dan mencemarkan citra informan, jika terjadi penolakan peneliti harus mempunyai alternatif agar data yang disampaikan dapat dipublikasikan dan disetujui oleh informan.
5. *Member Check* atau konsultan ahli, peneliti menyerahkan data yang diperoleh kepada ahli atau pembimbing. Dengan dilakukannya kegiatan ini, peneliti akan mendapatkan banyak saran yang bertujuan sebagai penyempurnaan hasil penelitian.

8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dirancang untuk mengetahui waktu yang diprlukan saat melakukan penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020

[71] Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga Bulan Mei 2020. Adapun penyajian dalam bentuk tabel jadwal kegiatan penelitian:

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian	Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		Minggu Ke																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan Penelitian																				
2.	Persiapan Penelitian																				
3.	Penyusunan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Pelaksanaan Penelitian																				
6.	Laporan Penelitian																				

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KEBIJAKAN REVITALISASI GELANGGANG OLAHRAGA DELTA SIDOARJO DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA

1. Hasil Penelitian

1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang terletak di Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai ±76.000.00 Ha dan memiliki letak geografis berada diantara $112^0$5' – $112^0$9' Bujur Timur dan $7^0$3' – $7^0$5' Lintang selatan. Batas Administratif Kabupaten sidoarjo yaitu : Sebelah Utrara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kota Gresik, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Sidoarjo memiliki 18 kecamatan, 31 Kelurahan, dan 322 Desa.[72] Menunjukkan bahwa letak geografis Kabupaten Sidoarjo sangat strategis, berikut merupakan gambar geografis Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 2. Geografis Kabupaten Sidoarjo

[72] "Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020," diakses pada 23 April 2020, http://portal.sidoarjokab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penduduk di Kabupaten Sidoarjo menurut data kependudukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 yang diupdate pada Maret 2020, tercatat penduduk sejumlah 1.129.368 laki-laki dan 1.109.701 Perempuan, dengan ini total penduduk yang menempati Kabupaten Sidoarjo sejumlah ±2.238.069.[73] Jumlah penduduk menurut mata pencaharian Kabupaten Sidoarjo di tahun 2015 dalam RPJMD 2016-2021 tercatat sebagai berikut:

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH	%	NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Tidak Bekerja	689114	32.40%	20	Imam Masjid	7	0.00%
2	Mengurus Rumah Tangga	94893	4.46%	21	Pendeta	203	0.01%
3	Pelajar/Mahasiswa	345397	16.24%	22	Pastor	5	0.00%
4	Pensiunan	18125	0.85%	23	Wartawan	167	0.01%
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	27908	1.31%	24	Ustadz/Mubaligh	121	0.01%
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	17224	0.81%	25	Juru Masak	28	0.00%
7	Kepolisian Ri (Polri)	5821	0.27%	26	Anggota Dpr Ri	5	0.00%
8	Perdagangan	28435	1.34%	27	Anggota Dpd Ri	2	0.00%
9	Petani/ Pekebun	43942	2.07%	28	Anggota Bpk	4	0.00%
10	Peternak	47	0.00%	29	Anggota MK	4	0.00%
11	Nelayan/Perikanan	845	0.04%	30	Bupati	1	0.00%
12	Industri	164	0.01%	31	Wakil Bupati	1	0.00%
13	Konstruksi	191	0.01%	32	Wakil Walikota	1	0.00%
14	Transportasi	186	0.01%	33	Anggota Dprd Prop.	2	0.00%
15	Karyawan Swasta	736439	34.62%	34	Anggota Dprd Kab./Kota	20	0.00%
16	Karyawan Bumn	545	0.03%	35	Dosen	2728	0.13%
17	Karyawan Bumd	425	0.02%	36	Guru	19419	0.91%
18	Karyawan Honorer	481	0.02%	37	Pilot	21	0.00%
19	Buruh Harian Lepas	3028	0.14%	38	Pengacara	121	0.01%

[73] "Penduduk Menurut Kecataman dan Jenis Kelamin 2018," Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sidoarjo, diakses pada 23 April 2020, https://sidoarjokab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/25/18/penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2018.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH	%	NO	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH	%
39	Buruh Tani/Perkebunan	1874	0.09%	60	Notaris	78	0.00%
40	Buruh Nelayan/Perikanan	269	0.01%	61	Arsitek	33	0.00%
41	Buruh Peternakan	18	0.00%	62	Akuntan	16	0.00%
42	Pembantu Rumah Tangga	541	0.03%	63	Konsultan	67	0.00%
43	Tukang Cukur	23	0.00%	64	Dokter	1396	0.07%
44	Tukang Listrik	76	0.00%	65	Bidan	1028	0.05%
45	Tukang Batu	1048	0.05%	66	Perawat	1844	0.09%
46	Tukang Kayu	213	0.01%	67	Apoteker	136	0.01%
47	Tukang Sol Sepatu	34	0.00%	68	Psikiater /Psikolog	13	0.00%
47	Tukang Las/Pandai Besi	98	0.00%	69	Penyiar Radio	5	0.00%
49	Tukang Jahit	440	0.02%	70	Pelaut	212	0.01%
50	Tukang Gigi	8	0.00%	71	Peneliti	6	0.00%
51	Penata Rias	40	0.00%	72	Sopir	3703	0.17%
52	Penata Busana	6	0.00%	73	Pialang	6	0.00%
53	Penata Rambut	41	0.00%	74	Paranormal	11	0.00%
54	Mekanik	243	0.01%	75	Pedagang	15127	0.71%
55	Seniman	69	0.00%	76	Perangkat Desa	1995	0.09%
56	Tabib	16	0.00%	77	Kepala Desa	286	0.01%
57	Paraji	2	0.00%	78	Biarawan/Biara wati	21	0.00%
58	Perancang Busana	6	0.00%	79	Wiraswasta	54694	2.57%
59	Penterjemah	5	0.00%	80	Pekerjaan Lainnya	317	0.01%
Jumlah						*2.161.659*	

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian tahun 2015

berdasarkan data diatas diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sidoarjo terbesar adalah penduduk yang bekerja sebagai karyawan swasta sebesar 34,62 %, posisi kedua adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai petani/pekebun sebesar 2,07 %, dan posisi ketiga ditempati penduduk bermata pencaharian sebagai pedagang sebesar 1,34 %.[74]

Dalam lingkup kepemerintahan, Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Bupati Saiful Illah dan Wakil Bupati Nur Ahmad Syaofuddin yang saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo mempunyai Visi dan Misi dalam memajukan kapasitas daerah kabupaten yang tertuang dalam RPJMD

[74] RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, hal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

VISI KABUPATEN SIDOARJO	MISI KABUPATEN SIDOARJO
Inovatif Sejahtera Mandiri Berkelanjutan	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan
	Meningkatkan kegiatan perekonomian daerah melalui optimalisasi basis Industri Pengelolahan, Pertanian, Pariwisata, UMKM, dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
	Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME serta dapat memelihara kerukunan ketentraman dan ketertiban
	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Tabel 4. Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo memiliki slogan/motto "SIDOARJO PERMAI BERSIH HATINYA" pertanian maju, andalan insdustri, bersih, rapi, serasi hijau, sehat, indah, dan nyaman. Memiliki arti bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah pertanian yang subur sebagai lumbung pangan, mempertahankan pertanian yang maju agar bisa swasembada pangan dengan intensifikasi pertanian dan menggunakan teknologi yang tepat, Industri menjadi penting sebagai perwujudan kesejahteraan maka kedua konteks ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus berjalan seiringan, selain itu masyarakat Sidoarjo berbudaya hidup dengan lingkungan bersih, rapi, serasi hijau, sehat, indah serta nyaman.[75]

1.2 Gambaran Umum Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Pengoperasian kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo dibuka pertama kali pada tahun 2001, pada saat pengoperasian pertama kali kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo langsung digunakan untuk *event* PON (Pekan Olahraga Naisional) ke XV. Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo berada di Jalan Pahlawan- Jalan Magersari Kabupaten Sidoarjo dengan garis lintang $7^0$26’51.40”S dan garis bujur $112^0$42’21.41”T. Lokasi Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo berada di sebelah timur gerbang utama pintu masuk-keluar tol Sidoarjo dan gedung perbelanjaan Lippo Plaza, Restoran MC Donald, dan hotel Luminor. Berada di sebelah barat gedung Suncity Mall, dan Ciplaz &Ramayana Prime, Restoran Burger King, serta Sun Hotel di Jalan Pahlawan. Letak Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup stretegis berada di persimpangan jalan besar utama pusat kota Sidoarjo, diantara jalan Pahlawan dan jalan Ponti.

[75] “Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo tahun 2020,” diakses pada 23 April 2020, http://portal.sidoarjokab.go.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3. Letak geografis kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo

sedangkan kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo mempunyai beberapa fasilitas olahraga seperti gedung Stadion Gelora Delta yang sering dipergunakan untuk pertandingan sepak bola juga menjadi kandang dari salah satu klub sepakbola di Sidoarjo yaitu Deltras dan cabang olahraga lain yang mampu ditampung di dalam stadion, Gedung olahraga *Indoor* yang dipergunakan sebagai tempat olahraga indoor seperti cabang futsal, basket, dan bola volly serta untuk kegiatan non-olahraga, Gedung kolam renang, Gedung Serbaguna, Gedung lapangan volly pantai yang dipergunakan untuk latihan volly pantai dan *event* perlombaan volly pantai, Gedung Aula Lapangan Tenis *Indoor* dan *Outdoor*, Musholla dan toilet, serta fasilitas umum atau parkir.

Gambar 4. Fasilitas Gedung Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo dalam kegunaannya memiliki zonasi kawasan yang meliputi: Zona Ruang Publik, merupakan zona dengan aktivitas tinggi meliputi area terbuka hijau, parkir, PKL, *Jogging track*, dan lapanganbebas. .Zona Ruang Semi Publik yang merupakan zona dengan aktivitas sedang meliputi stadion utama, lapangan *indoor*, lapangan tenis, lapangan voli pantai, dan lintasan sepatu roda. Zona Privat merupakan zona dengan aktivitas khusus yang meliputi gedung renang, gedung serbaguna, dan stasiun radio. Zona Servis merupakan zona pelayanan yang tersebar di seluruh kawasan meliputi area informasi, gedung servis, tempat parkir, sarana ibadah, toilet, dan sarana kebersihan.[76] Berikut merupakan pembagian zonasi kawasan:

Gambar 5. Zonasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

dengan area yang menempati lahan ±110.000 m^2, Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo menjadi kawasan olahraga terluas yang dimiliki oleh pemerintah daerah se-jawa timur, Dilengkapi dengan fasilitas yang saat

[76] MKU Consultant, "Kajian Bappeda Revitalisasi Kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo," Bappeda Kabupaten Sidoarjo, 2017, hal 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini ada, Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo menurut standar tata cara perencanaan bangun gedung olahraga oleh Departemen Pekerjaan Umum adalah Gelanggang olahraga bertipe B yang dalam penggunaannya untuk melayani wilayah Kabupaten/Kotamadya dengan klasifikasi minimal 3 cabang olahraga yang dimuat dalam kawasan yaitu bola basket, bola voli, dan bulutangkis.[77]

1.3 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

1.3.1 Konsep Umum Pedagang Kaki Lima

Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari lapangan pekerjaan pada umumnya adalah masyarakat urban yang miskin pendapatan, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup dan mendapat pekerjaan atau gaji yang lebih baik ada di daerah perkotaan, hal ini lebih memungkingkan terjadi daripada mereka tinggal di sebuah desa. Para imigran ini pada umumnya bekerja dalam sektor informal sehingga cukup untuk konsumsi sehari-hari, hal ini memicu semakin cepat laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan.[78] Hal ini juga dialami oleh Kabupaten Sidoarjo, secara spesifik pengertian dari Pedagang Kaki Lima menurut pemerintahan Indonesia adalah seroang yang menjalankan suatu usaha perorangan atau kelompok yang menjalankan penjualan barang atau jasanya dengan menggunakan

[77] *Ibid.*, hal 13.
[78] Faried Ali, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian fasilitas umum seperti jalan/trotoar ataupun halaman yang orientasinya untuk kepentingan umum serta tempat yang memang bukan miliknya. Pedagang kaki lima biasanya memiliki pola yang tidak teratur dengan baik dalam segi waktu hingga permodalan, bahkan sering tidak tersentuh peraturan-peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga kegiatan yang dilakukan berkonotasi "liar", pedagang kaki lima biasanya membuka usaha dengan perlengkapan dan omzet yang terbilang kecil sehingga pendapatan mereka rendah dan kadang tidak bisa diperkirakan, pedagang kaki lima sering dijumpai bahwa mereka masih belum menguasai ilmu perbankan pembukuan hingga perkreditan, dan yang terpenting pedagang kaki lima umumnya tidak mempunyai tempat yang tetap sehingga posisi dalam membuka usaha tergantung apa yang dihadapi dalam lapangan. Pedagang kaki lima di kota-kota besar merupakan satu fenomena sosial kegiatan perekonomian rakyat kecil yang seringkali mengalami penggusuran oleh aparat pemerintah yang seolah-olah mereka tidak mempunyai hak asasi manusia atas dasar ekonomi sosial dan budaya.[79]

1.3.2 Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tahun 2011

Perspektif negatif atas kehadiran pedagang kaki lima yang bermunculan di kota-kota besar seperti yang ada di Kabupaten Sidoarjo merupakan fenomena sosial dan kerap menjadi perbincangan yang mengarah pada kebijakan politik atas kehadiran pedagang kaki lima

[79] *Ibid.*, hal 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sering dinilai sebagai pembunuh keindahan kota. Kabupaten Sidoarjo pernah menerapkan kebijakan atas kehadiran pedagang kaki lima di wilayah alun-alun kabupaten Sidoarjo, kebijakan tersebut berupa pemindahan lokasi atas dasar keinginan Bupati yang menyoroti bahwa kehadiran pedagang kaki lima di wilayah alun-alun semakin tidak dapat dikontrol dan membuahkan *image* buruk alun-alun yang dianggap sebagai jantung perkotaan suatu daerah. Didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 5 tahun 2007 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, berbunyi dilarang untuk dilakukannya bentuk usaha berdagang disepanjang jalanan, taman, jalur hijau, dan tempat umum. Dengan adanya keinginan Bupati dan dikung dengan munculnya Peraturan Daerah tersebut, muncul kebijakan relokasi PKL di tahun 2011 yang dilakukan oleh tim pembina PKL dibentuk oleh Bupati Sidoarjo untuk menjalankan kebijakan relokasi PKL. Hasil dari dibentuknya tim pembina PKL adalah menjadikan GOR sebagai salah satu tempat relokasi untuk PKL yang berada di alun-alun Sidoarjo sebagai tempat sementara PKL untuk menjalankan aktivitasnya yakni melakukan jual beli.[80]

Pemindahan pedagang kaki lima ke Gelanggang olahraga bukan tanpa alasan, keinginan Tim Pembina PKL untuk mendatangkan masyarakat agar gelanggang olahraga tidak terlihat sepi bahkan suram

[80] Riza Ali Fikry, "Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo.*"* Kebijakan Manajemen Publik, ISSN 2303 – 341 X, Volume 1, Nomor 1, Januari 2013, hal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dengan mendatangkan PKL agar bedagang di halaman GOR Sidoarjo. Tujuannya untuk mengundang minat masyarakat agar GOR Sidoarjo terlihat ramai dengan keberadaan PKL dan kedatangan pembeli. Tim Pembina PKL bertujuan untuk mencarikan tempat atas kebijakan relokasi PKL dari alun-alun, setelah keputusan lokasi sudah ditetapkan atas kebijakan relokasi, dinas-dinas terkait kembali pada bidang-bidangnya dalam menyikapi masalah PKL.

"Jadi masalah pemindahan itu tugas tim pembinaan, jadi bagaimana baiknya itu tim pembinaan yang mengatur bukan hanya disperindag, lah itu tim pembina itu dibentuk oleh Bupati, setelah tugas selesai, kita hanya bisa melakukan pembinaan atas PKL, urusan mengelola kalau menurut bahasa Peraturan Bupati, adalah dinas yang mempunyai lahan untuk dilakukannya kegiatan, hal ini adalah Disporapar Sidoarjo. jadi kalau kita yang mengelola itu cuma di sentra PKL Gajah mada. Yang berhak mengelola PKL di GOR adalah Disporapar, tapi kita bertanggung jawab pada PKL jangan sampai orang-orang disana bermasalah istilahnya paling tidak bisa berjualan. Jadi munculnya kebijakan revitalisasi GOR keputusan ada di pihak pengelola, kita diajak rapat karena menyangkut PKL yang ada disana." [81]

Kebijakan relokasi PKL atas dasar keinginan Bupati dan disepakati bahwa GOR Sidoarjo menjadi salah satu tempat untuk para PKL berjualan. Sifat dari kebijakan relokasi untuk memilih halaman GOR Sidoarjo adalah sementara, maksudnya lahan yang digunakan adalah lahan sementara untuk para PKL berjualan disana, banyak PKL menganggap setelah adanya kebijakan relokasi akan disusul dengan kebijakan relokasi kedua yang menetapkan satu kawasan sebagai lahan permanen untuk para PKL, namun nyatanya sampai saat ini PKL yang

[81] Badriyono, wawancara oleh penulis, 06 April 2020, Pukul 10.11 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beroperasi di halaman GOR masih belum diberikan keputusan dari pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam rangka menetapkan lahan permanen bagi mereka.

"karena memang tahun 2011 itu dipindahkan kesini dengan catatan untuk penampungan sementara, Cuma penampungan sementara itu keberlanjutannya ditampung dimana untuk lokasi permanen kami juga sampai saat ini belum tahu ada kebijakan baru. kemudian yang berkaitan dengan revitalisasi GOR, yang itu tidak mengindahkan PKL itu kan juga tidak hanya bertolak belakang tetapi disini ada satu mainset bahwa tidak mengindahkan ekonomi masyarakatnya terutama para PKL disini, kalau dulu sudah ada sejarah relokasi tapi mau ditindaklanjuti apa juga tidak ada. kebetulan waktu relokasi itu yang disuruh ndata saya sendiri, itu sampai berjumlah 1100 PKL yang dipindahkan sementara ke GOR ini. Ya cuma karena setelah itu kok sampai hampir 10 tahun belum ada penanganan secara action untukpenataan PKL pada saat itu ya jadinya inisiatif sendiri dari pedagang untuk mengembangkan usahanya sendiri. Jadi inisiatifnya berupa semaunya yang berjualan, mau jualan pagi mau jualan sambian mau jualan jadi mata pencaharian pokok itu memang belum ada manajemen, jadi seenaknya PKL bagaimana mereka disuruh berjualan secara mandiri tanpa ada pendampingan" [82]

"ya jadi kita kan sudah ada Perda PKL, sayangnya pemkab masih belum maksimal melaksanakan perda itu, jadi sampai saat ini sepertinya Pemkab masih belum melakukan studi tentang bagaimana dan dimana posisi yang pas untuk PKL sendiri, masih belum terindahkan dengan baik. Menurut saya sih memang dari pelaksanaan Perda PKL dari Pemkab ini yang tidak dioptimalkan dengan betul sehingga sampai saat ini masih belum adanya kebijakan lanjut dari pemkab sehingga urusan PKL ini masih belum selesai." [83]

Kebijakan relokasi di tahun 2011 hingga saat ini masih diberlakukan, data yang didapat secara empiris menunjukkan bahwa jumlah PKL di kawasan halaman GOR Sidoarjo tidak dapat diperkiran sering naik dan

[82] Kasmu'in, wawancara oleh penulis, 15 April 2020.
[83] Aditya Nindyatman, wawancara oleh penulis, 13 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turun seiring dengan kegiatan yang ada di kawasan GOR Sidoarjo, namun secara umum jumlah PKL mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Pada tahun 2011 PKL yang dipindahkan dari alun-alun menuju GOR Sidoarjo berjumlah ±1100 PKL yang berjualan makanan dan minuman, selanjutnya disebut PKL Mamin (Makanan Minuman) dan PKL yang tidak berjualan makanan dan minuman yang selanjutnya disebut PKL Non-mamin. Dalam Kajian revitalisasi kawasan GOR Delta Sidoarjo yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, jumlah PKL yang menempati kawasan GOR berjumlah 294 di tahun 2017. Selanjutnya data yang diberikan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Sidoarjo per bulan Januari 2020, jumlah PKL di kawasan GOR Sidoarjo hanya berjumlah 108 termasuk PKL Mamin dan Non-mamin. Data yang didapat dari Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo sejak diadakannya sosialisasi atas kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo kepada PKL di kantor Bupati Sidoarjo, jumlah yang didapat hampir mencapai 300 PKL. Sedangkan data yang didapatkan secara empiris dengan menemui ketua PKL yang berada di kawasan GOR, jumlah PKL yang berada di kawasan GOR mencapai 400 PKL Mamin dan PKL Non-mamin.

Data Jumlah PKL yang berada di Kawasan GOR Delta Kabupaten Sidoarjo				
Versi	**Waktu diperoleh**	**Secara**	**Jumlah PKL**	**Keterangan**
DISPORAPAR	01 April	Lisan	≥300	Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo	2020	denganWawancara Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten		diperoleh DISPORAPAR Kabupaten Sidoarjo pasca melakukan sosialisasi kebijakan revitalisasi kawasan GOR kepada Pedagang Kaki Lima pada bulan Maret 2020
BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo	06 April 2020	Data Tertulis dalam laporan akhir kajian revitalisasi kawasan Gelora Delta Sidoarjo oleh MKU Consultant Bappeda Sidoarjo	294	Data diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo
DISPERINDAG Kabupaten Sidoarjo	13 April 2020	Data tertulis dengan format *softcopy file*	108	Data dikirim oleh DISPORAPAR Kabupaten Sidoarjo kepada DISPERINDAG Kabupaten Sidoarjo pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

				bulan Januari 2020
Ketua PKL Kawasan GOR Sidoarjo	16 April 2020	Lisan dengan wawancara Ketua Pedagang Kaki Lima Kawasan GOR Delta Sidoarjo	≥400	Data diperoleh dari kordinasi antar Koordinator Lapangan komunitas PKL

Tabel 5. Data jumlah PKL menurut beberapa sumber

1.4 Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

1.4.1 Faktor Munculnya Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2017 muncul Kebijakan revitalisasi GOR Delta Sidoarjo yang juga menyoroti keberadaan PKL dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan GOR Delta Sidoarjo. Keberadaan PKL ini merupakan output kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang merelokasi PKL dari alun-alun menuju ke GOR Sidoarjo pada tahun 2011 silam. Namun relokasi ini tidak dilanjuti dengan adanya kebijakan penataan PKL, sehingga para PKL secara mandiri mencari tempat yang strategis untuk membuka usahanya di kawasan GOR Sidoarjo, hal tersebut memicu kesemrawutan kawasan GOR yang menjadi kumuh dan tidak terartur karena kebijakan ini dianggap hanya sebagai pemindahan masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan penyelesaian masalah.[84] Realitanya dari kebijakan relokasi PKL menuju ke GOR Sidoarjo di tahun 2011, hanya ada beberapa PKL saja yang bertahan, dan sisanya adalah PKL urban, yang artinya mereka adalah PKL baru yang sebelumnya tidak berjualan di alun-alun, ditambah dengan munculnya tukang parkir liar, dan ada beberapa PKL yang menaruh gerobaknya di sekitaran GOR yang itu menambah kesemrawutan dan kumuh.

"ya memang tahun 2011 tepat dibulan Oktober ada kegiatan daerah memindahkan PKL yang ada di Alun-alun ke kawasan GOR karena juga PKL di Alun-alun pada akhirnya tidak bisa tertib, dipandahkan ke GOR pun juga pada waktu itu tidak dibekali dengan konsep penataan yang baik hanya sekedar dipindah, sekedar dipindah ke GOR itu kan dalam rangka menghidupkan kawasan GOR. Pada saat itu ratusan yang dipindah, tetapi dalam perkembangannya jumlah ini tidak bertahan tinggal yang asli dari relokasi itu hanya beberapa orang saja, dan PKL yang lain itu adalah PKL baru dan bersifat urban, artinya bukan PKL yang ada dari Alun-alun itu mereka yang urban itu datang ke Sidoarjo dengan dagangannya, Nah ini juga tidak ada pengendalian, orang dengan mudahnya saja seenaknya sendiri berada disitu dan itu membuat suasana yang tidak nyaman dan membuat kumuh tempat itu. Sebagai kawasan olahraga di sidoarjo saat ini memang perkembangan pemanfaatannya belum maksimal dan cenderung tidak sesuai dengan maksud didirikannya GOR. Contohnya area dihalaman GOR itu diarahkan dukungan untuk parkir dan untuk kegiatan olahraga yang terbuka. Tetapi realitasnya justru sekarang ini area di halaman itu digunakan untuk PKL memakirkan rombong dagangnya dan kegiatan yang non-olahraga, dan itu berlangsung setiap hari yang mengakibatkan kondisi stadionnya jadi tidak bagus, tidak baik dan tidak maksimal" [85]

"untuk kebijakan revitalisasi ini, dari sejarahnya memang dulu GOR ini sangat sepi sebelum datangnya PKL, awal itu kan memang hanya

[84] Mochammad Hatta Karuniawan, dkk, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)," JKMP (ISSN. 2338-445X), Volume 3, Nomor 1, Maret 2015, 1-116, hal 9.
[85] Djoko Supriyadi, Wawancara oleh penulis, 01 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gedung sepakbola, itu kan sekarang ada kios-kios, dulu itu belum ada kios-kios ini kosong gak berpenghuni, akhirnya para PKL ini diundang untuk menempati kios-kios ini di tahun 2003 an kalau tidak salah pokoknya setelah PON 2000, mereka diundang untuk berdagang memang" [86]

Didasari oleh kepentingan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengembalikan fungsi kawasan Gelanggang Olahraga Delta Sidoarjo sebagai tempat olahraga dan berkumpulnya masyarakat melakukan berbagai kegiatan positif. Selama ini sebelum dilakukannya tindakan revitalisasi kawasan GOR banyak sekali kegiatan negatif yang dilakukan masyarakat seperti kegiatan tawuran, pencopetan, dan sebagai tempat transaksi jual beli minuman keras, kegiatan tersebut didukung dengan kondisi GOR yang memang sepi dan kurangnya penerangan lampu di kawasan terutama pada malam hari. Stan-stan yang dibangun mengelilingi Stadion GOR Sidoarjo direncanakan untuk ditempati masyarakat sebagai tempat kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kebutuhan olahraga, akan tetapi tidak banyak dari kalangan ekonomi yang mengindahkan rencana tersebut, hanya satu pelaku ekonomi yang berjualan alat kebutuhan olahraga, banyak pelaku ekonomi masih belum mempunyai tujuan untuk menjual alat-alat olahraga sehingga banyak stan yang dipergunakan untuk pertokoan biasa, seperti menjual makanan dan minuman, Salon potong rambut, dan sebagai kantor swadaya. Namun beberapa stan yang mengelilingi stadion GOR Sidoarjo juga disewa sebagai tempat karaoke dan berjualan minuman keras secara ilegal.

[86] Kasmuin, wawancara oleh penulis, 15 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pada awalnya Stan-stan disitu dibangun adalah stan yang mendukung GOR sebagai kawasan olahraga dan perekonomian sebagai kawasan olahraga, contoh pertokoan yang jual alat-alat olahraga, penyewaan fitness tetapi pada prakteknya tidak seperti itu dan tidak terkontrol dengan baik. Lalu ada yang dijadikan rumah musik, karaoke, rumah billyard dan sebagainya, yang ini pada akhirnya mereka melakukan hal-hal transaksional yang bersifat negatif, contohnya berjualan minuman keras mabuk-mabuk dan sebagainya. Nah ini pada akhirnya udah PKLnya semerawut, stan-stan yang ditujukan tidak tepat sasaran fungsinya maka kondisi GOR ini makin hari semakin tidak baik, sering dilakukan operasi lalu terbukti bahwa ada yang menjual minum-minuman keras dan sebagainya yang bersifat negatif." [87]

pemerintah Kabupaten Sidoarjo melihat realitas kawasan GOR Sidoarjo yang semakin hari semakin semrawut dengan adanya PKL yang dirasa tidak ikut menjaga kenyamanan lingkungan GOR Sidoarjo, ditambah lagi maraknya kegiatan negatif yang mulai dilakukan oleh masyarakat seperti melakukan transaksi perdagangan minuman keras dan kegiatan negatif lainnya.

"selain itu, alasan dilakukannya revitalisasi ini kan sebenarnya dari pembangunan pertama kawasan GOR Sidoarjo ini, masih belum pernah dilakukan pembangunan berskala besar seperti yang sedang dilaksanakan ini, dulu pembangunan terakhir yang di peresmian kawasan GOR di tahun 2000, sampai sekarang kawasan ini masih belum pernah terenovasi atau istilahnya dilakukan peremajaan kawasan, jadi mas harus mencantumkan bahwa memang kawasan GOR ini belum pernah dilakukan renovasi berskala besar sehingga hal ini menjadi perlu untuk merawat kawasan GOR itu tadi." [88]

Selain adanya kesemrawutan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima, dan juga kurang optimalnya pemanfaatan kawasan GOR Sidoarjo, fakta bahwa kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo belum pernah diberikan

[87] Djoko Supriyadi, wawancara oleh penulis, 01 April 2020.
[88] Mashuri, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan perawatan atau peremajaan kawasan agar kawasan tetap berfungsi sebagai tempat semestinya. Faktor-faktor tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah untuk melakukan kebijakan revitalisasi yang berguna untuk mengembalikan fungsi kawasan GOR Delta Sidoarjo sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dengan berbagai macam kegiatan yang bernilai positif, termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para Pedagang kaki lima.

1.4.2 Dasar Hukum Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo tidak dilakukan semena-mena, hal ini mengacu pada kebijakan RPJMD yang mendorong pendapatan asli daerah secara berkelanjutan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah salah satunya ada di sektor pariwisata, dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berguna untuk mendorong peningkatan pembangunan yang proporsional terutama pada terwujudnya peningkatan kualitas dan penyediaan ruang terbuka hijau.[89] Munculnya kebijakan revitalisasi juga mengacu pada dasar hukum yang berlaku, antara lain: (1) Peraturan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012

[89] RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021, hal 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang Retribusi Tempat dan Olahraga, (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perarutran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.[90]

No	Dasar Hukum	Pembahasan Singkat
1	Peraturan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah	Membahas mengenai dasar atau petunjuk untuk pengelola program atau penerima bantuan terkait melaksanakan tujuan pemberian bantuan rehabilitasi atau pembangunan gedung berupa prasarana olahraga agar pelaksanaan program rehabilitasi terlaksana dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran, dan

[90] MKU Consultant, "Kajian Bappeda Revitalisasi Kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo." Bapedda Kabupaten Sidoarjo, 2017, hal 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Daerah	efektif yang sesuai dengan perundang-undangan
2	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat dan Olahraga	Membahas mengenai panduan retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga dengan maksud menetapkan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo, penetapan tarif retribusi digunakan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, Juga membahas mengenai mekanisme pemungutan retribusi hingga sanksi jika tidak sesuai dengan kententuan yang ada di dalam peraturan daerah yang ditetapkan
3	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan	Membahas mengenai perhatian pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan kesempatan bagi PKL melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, juga dalam hal menumbuhkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha mikro yang tanggunh dan mandiri. Penataan PKL dalam peraturan ini berisikan tentang melakukan pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, dan peremajaan lokasi PKL
4	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perarutran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Membahas mengenai mekanisme pelaksanan peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara rinci menjelaskan maksud dari pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL, dan peremajaan PKL yang dapat dijadikan panduan dinas terkait dalam melakukan kegiatan penataan
5	Peraturan Daerah	Membahas mengenai rencana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021	pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo periode lima tahun di tahun 2016-2021 yang didalamnya menjelaskan prioritas pembangunan serta sasaran pokok dan arah pembangunan dalam waktu lima tahunan sesuai dengan Nawacita RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa timur 2016-2021.
6	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo	Membahas mengenai rencana penataan ruang dan penataan wilayah kabupaten Sidoarjo untuk mewujudkan daerah wilayah yang aman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap mewujudkan keharmonisan antara linkungan alami dan lingkungan buatan, serta menjadi pelindungan fungsi dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Tabel 6. Dasar Hukum Kebijakan Revitalisasi Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revitalisasi Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo merupakan kebijakan penataan kawasan sebagai satu upaya rekayasa sosial yang diselenggarakan di suatu wilayah dan dilakukan bersama dengan tujuan menciptakan satu sistem yng komprehensif terkait aktivitas yang berlangsung di kawasan dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat setempat, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat, dan mengembangkan kualitas lingkungan dan kelestarian lingkungan.[91]

1.4.3 Konsep Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Pada kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, DPRD Kabupaten Sidoarjo pernah melakukan *hearing* dengan pihak Disporapar Kabupaten Sidoarjo dalam mendengar keinginan dilakukannya revitalisasi GOR Delta Sidoarjo, kesepakatan kegiatan *hearing* atas rencana revitalisasi tersebut adalah dengan tetap mempertahankan eksistensi Pedagang Kaki Lima dan tidak menghilangkan keberadaan mereka di kawasan GOR Sidoarjo.

"jadi sebelum adanya demo, kita DPRD sudah pernah melakukan hearing satu kali, kita menemukan Dispora selaku dinas yang menjadi penanggungjawab GOR. Kita dari DPRD mendorong untuk melakukan kebijakan revitalisasi yang itu juga tidak menolak adanya PKL dengan cara melakukan penataan. Penataan bukan berarti menghilangkan, bahwa mungkin size/ukuran dari para PKL membuka dagangannya itu disamakan, kan ada tuh yang PKL buka dagang dengan posko atau

[91] *Ibid.*, hal 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenda yang memanjang, melebar, dan sebagainya. Sehingga dari itu kita meminta adanya penataan dengan ukuran yang sama."[92]

rencana yang disepakati saat itu adalah dengan melakuakn revitalisasi kombinasi fungsi, yakni dengan merenovasi apa yang perlu dibenahi seperti penambahan penerangan jalan umum dan perbaikan jaln serta membuat drainase agar akses untuk menuju fasilitas yang ada di GOR Sidoarjo menjadi aman. Revitalisasi mengarah kepada penghijauan atau yang disebut dengan ruang terbuka hijau dan mengakomodasi keberadaan PKL. Menurut Bapak Aditya salah satu anggota dewan yang dimintai informasi atas kebijakan revitalisasi, dengan adanya kombinasi, jadi konsepan akan mengarah pada 2 jenis kegiatan besar yang dapat ditampung di kawasan GOR, yaitu untuk kegiatan olahraga dan kegiatan ekonomi berbasis pedagang kaki lima.

"kita mengarahkan ke ruang terbuka hijau, kita juga mengakomodasi keinginan PKL, dan itulah yang harusnya dijadikan kombinasi, jadi konsepan dari kami adalah kombinasi dalam suatu tempat menjadi 2 jenis kegiatan, yaitu sebagai tempat berjualan dan tempat berolahraga, juga sebagai representatif fungsi GOR sebagai tempat olahraga, begitu juga agar tidak kumuh, kalau PKL bisa ditata dengan baik saya rasa orang akan semakin senang untuk mengunjungi tempat itu. Tapi kasus ini kan sudah berjalan, demo sebenarnya mereka mengingatkan untuk tetap memperhatikan kehadiran para PKL, revitalisasi sudah dijalankan karena sudah dianggarkan."[93]

Konsep Revitalisasi yang dirancang oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo selaku perencana atas pembangunan daerah di tahun 2017, mengarah kepada kebijakan kolaborasi antara revitalisasi kawasan GOR

[92] Aditya Nindyatman wawancara oleh penulis, 13 Maret 2020.
[93] Aditya Nindyatman wawancara oleh penulis, 13 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo dengan penataan PKL, kebijakan revitalisasi diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2018 hingga tahun 2024 dengan cara bertahap. Konsep pembangunan bersifat dalam pemenuhan fasilitas ruang terbuka hijau untuk masyarakat, akan ada sarana rekreasi bersifat olahraga, yang artinya perwujudan konsep ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan untuk menarik minat masyarakat agar meramaikan kawasan GOR sehingga kawasan ini tidak digunakan kegiatan yang negatif.

"iya, jadi kita kan juga berhubungan dengan kondisi keuangan kekuatan APBD kita berapa, jadi itu yang dibuat acuan untuk biaya revitalisasi GOR itu bertahap .Jadi perencanaannya itu di tahun 2017, lah action plannya dilaksanain tahun 2018 sampai 2024, di tahun 2018 itu melakukan One Gate System, 2019 pembangunan pagar keliling kawasan GOR dan penyempurnaan One Gate System, lalu melakukan perbaikan drainase sisi timur laut yang dekat kolam renang, pembangunan PJU dikawasan GOR ada 40 titik, pembangunan Pos jaga di gerbang-gerbang masuk, normalisasi saluran peninggian dan pemerataan paving disekitar lapangan serbaguna dan kolam renang itu tahun 2019. Jadi konsep pembangunan ini menuju ke kepentingan umum, ada sarana rekreasi, sarana olahraga, ada food ponti, ada jajanan, ada tempat parkir, foodcourt, slalom area/pasar malam, pintu, parkir sepeda sendiri dan parkir mobil sendiri, jadi seperti kompleks seperti senayan". [94]

Untuk penataan PKL, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak merencanakan pemindahan PKL bahkan pergusuran terhadap PKL melainkan tetap melibatkan kehadiran PKL untuk meramaikan kawasan GOR Sidoarjo dengan kegiatan ekonomi. Dalam konsepan Bappeda Kabupaten Sidoarjo, PKL makanan dan minuman direncanakan untuk

[94] Mashuri, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan bangunan berupa *foodcourt*, sedangkan untuk PKL non-makanan dan non-minuman akan diberikan lahan di sekitaran area slalom untuk lahan kegiatan pasar malam. Dengan jumlah yang berkisar 250 pedagang pada tahun 2017, Bappeda merekomendasikan bahwa perlu dilakukan pendataan ulang PKL yang berada di kawasan GOR yang mempunyai TDU PKL atau ber-KTP asli Sidoarjo yang dapat memiliki stand di dalam *foodcourt* atau selebihnya akan dilakukan relokasi ke sentra PKL lainnya.[95] Berikut merupakan rencana site plan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo menurut Bappeda Kabupaten Sidoarjo:

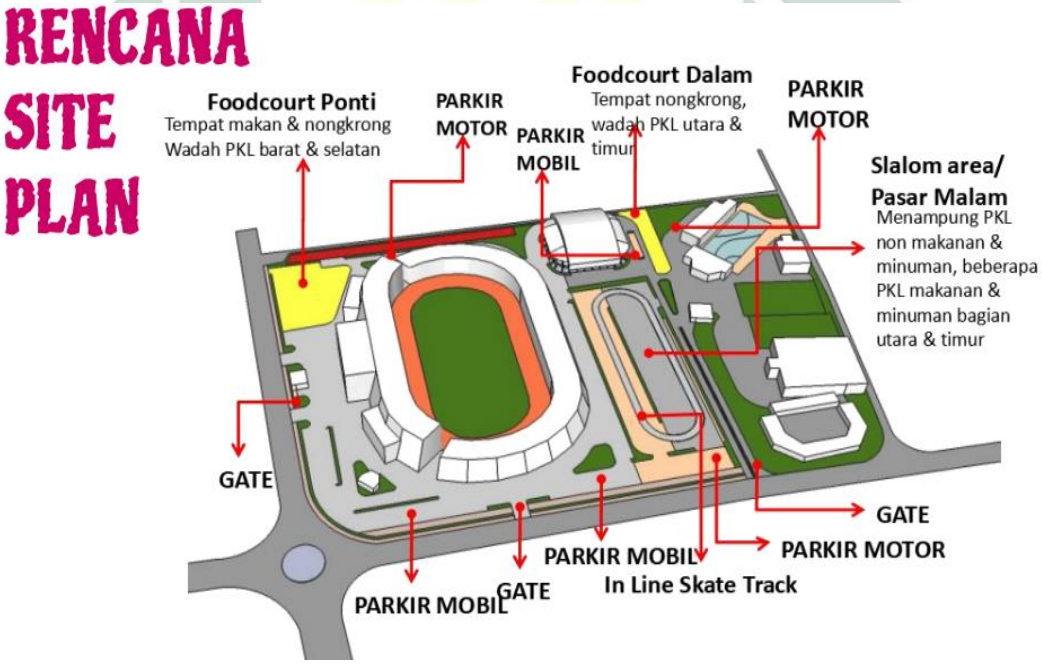

Gambar 6. Rencana Site Plan Revitalisasi Kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo

mengacu pada konsep kebijakan site plan yang ditunjukkan, dalam rencana revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo akan

[95] TDU singkatan dari Tanda Daftar Usaha merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL di lokasi yang ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan 3 akses pintu masuk serta pintu keluar kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, kemudian penambahan bangunan berupa *Foodcourt* Ponti yang berada disebelah barat laut GOR Sidoarjo agar ditempati PKL berjualan makanan dan minuman yang saat ini berada di sebelah barat dan selatan, lalu menambahkan lagi bangunan *Foodcourt* Dalam yang berada disisi timur gedung olahraga *indoor*, nantinya akan diisi oleh para PKL yang berjualan di bagian utara dan timur GOR Sidoarjo. lalu melakukan penataan parkir mobil dan parkir motor secara terpisah, parkir mobil akan ditempatkan di sebelah selatan Stadion Delta Sidoarjo, untuk parkir motor akan ditempatkan di sisi area jogging track dan spatu roda serta di sebelah gedung kolam renang GOR Sidoarjo. Melakukan penataan bagi PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman serta beberapa PKL makanan dan minuman sebelah utara dan timur yang tidak mendapatkan tempat agar dipindahkan di dalam sirkel lintasan *jogging track* dan sepatu roda.

Kebijakan Revitalisasi GOR Sidoarjo dijalankan tanpa adanya penggusuran PKL, hingga kebijakan selesai pada tahun 2024, PKL tetap ditampung dan diperhatikan keberadaan mereka di kawasan GOR Sidoarjo. menurut Pak Mashuri selaku informan peneliti, Wakil Bupati Sidoarjo Pak Nur Ahmad Syaifudin pernah mengusulkan untuk penataan PKL dengan kebijakan *food truck* atau truk makanan. *Food truck* adalah konsep dalam pengembangan bisnis penjualan makanan ataupun minuman dengan memakai sebuah kendaraan khususnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai ruang untuk mengatur segala operasional mulai dari pemesanan, pembuatan, hingga pelayanannya dilakukan didalam kendaraan yang didesain atau dimodofikasi sedemikian rupa untuk menarik daya beli dan perhatian konsumen.[96] Dalam penggunaan Truk sebagai kendaraan yang menjualbelikan makanan dan minuman, tentunya sangat banyak pertimbangan-pertimbangan yang diperhatikan terutama pada mental pengusaha, memahami resiko yang ada.[97]

"Sampai pembangunan selesai, PKL itu masih ditampung, untuk sementara tidak ada kajian yang mengarah ke penetapan lokasi atau mencari lokasi baru untuk PKL tadi, Cuma ini ada kebijakan untuk mendata PKL-PKL yang ada disana. Jadi kemarin itu ada rapat sama pak wakil bupati, terlebih saat membahas PKL itu dari pak wakil bupati direncanakan food truck jadi untuk tempat berjualannya beroda, tapi penjual itu didata juga jadi tidak serta merta penjual bisa membuka usahanya disana nanti sehingga ada pengelolaan yang baik, tidak sampai overload" [98]

Dengan adanya tindak kriminal, kesemrawutan penataan PKL, stan-stan yang tidak tepat sasaran hingga perdagangan miras dan kegiatan negatif yang itu memicu *image* pemandangan kawasan GOR yang dinilai sebagai kawasan kumuh dan tidak tertata, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata selaku pengelola wilayah menginisiasi konsep baru revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo yang pada tujuan inti adalah mengembalikan kawasan GOR Sidoarjo menjadi kawasan olahraga dan tidak pula mengusir keberadaan PKL yang bergerak

[96] Rakean Tajali Kahfi, "Analisis dan Usulan Strategi dan Bauran Ritel Food Truck di Kota Bandung,".(Skripsi Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Ekonomi 2017), hal 15
[97] Dian Palestina Saputri, "Izin Usaha Mendirikan Usaha Food Truck dan Peluang Bisnis Food Truck", Jurnal Universitas Sriwijata Fakultas Hukum, hal 5
[98] Mashuri, wawancara oleh penulis, 30 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang ekonomi. Bapak Djoko Supriyadi selaku kepala Disporapar Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa revitaliasi kawasan GOR secara umum mengarah 4 sektor pembenahan, yakni keamanan kawasan, kenyamanan kawasan, sarana dan prasarana, dan penataan PKL. Melakukan penambahan alat keamanan berupa pos keamanan, pagar dan pintu masuk-keluar serta memberlakukan *One Gate System* untuk mengoptimalkan kemananan kawasan GOR Sidoarjo, dan memberlakukan jam operasional kawasan GOR hingga pukul 23.00 WIB. Dalam lingkup mengoptimalkan kawasan GOR Sidoarjo adalah dengan memilih membereskan masalah banjir yang sering terjadi di jalanan dengan memperbaiki drainase, peninggian jalannan agar tidak tergenang banjir dan penerangan jalan umum untuk menerangi kawasan GOR Sidoarjo yang memang sebelum dilakukannya revitalisasi terlihat suram saat malam karena kurangnya penerangan lampu. Lalu rencana untuk membangun dan melakukan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang memang dibutuhkan sertadirasa kurang optimal dalam pengelolaannya agar kedepannya atlet berlatih dapat merasakan kualitas akan sarana dan prasarana olahraga dengan tujuan kedepannya atlet dari Sidoarjo menuai banyak berprestasi. Kemudian melakukan pembenahan dalam penataan PKL dengan cara melakukan sosialisasi atas kebijakan yang direncanakan untuk para PKL dalam hal ini kebijakan untuk diberlakukannya *Food Truck* bagi PKL yang berjualan makanan dan minuman agar ditata disebelah barat daya kawasan GOR Sidoarjo, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menata PKL non-makanan dan non-minuman agar ditata disebelah barat laut kawasan GOR Sidoarjo, hal ini merupakan wujud atas kebijakan revititalisasi kawasan GOR Sidoarjo dalam penataan kolaboratif antara sektor olahraga dan sektor ekonomi dalam satu kawasan agar nantinya antar sektor ekonomi dapat mendukung sektor olahraga dan sebaliknya.[99] Berikut merupakan penjelasan konsep Bapak Djoko Supriyadi dalam menjalankan kebijakan revitalisasi kawasan GOR di sektor olahraga:

"Rencananya itu penambahan lapangan basket outdoor itu tempatnya di sebelah kanan gedung serbaguna GOR, sebelah kirinya gedung serbaguna itu mendirikan lapangan futsal outdoor jadi nanti basket dan futsal itu dipindahkan ke outdoor kalau turnamen saja memakai lapangan indoor, lalu perbaikan Gedung tennis indoor menjadi gedung bulutangkis, Lalu rehabilitasi gedung Voli pantai, kita setting jangan jadi gedung tunggal bisa dibuat event lain, caranya gampang saja pasirnya itu ditutup jika ada event non-voli pantai misalkan ada event karate, jadi pasirnya itu kan ditutup papan, Lalu pemindahan lapangan sepatu roda dan pembangunan baru sepatu roda itu kita pindahkan, karena tidak standart, lapangan sepatu roda itu terlalu besar, lalu tidak ada kemiringan untuk rute berbelok, Lalu merenovasi musholla menjadi masjid yang sederhana tidak besar juga tidak kecil intinya pas buat orang yang lagi keluar rumah dan berada di kawasan itu, Lalu mengubah sirkulasi air Kolam renang GOR yang asal mulanya dari sumur ke air PDAM, wall climbing itu renovasi juga menambahi unit wall nya yang miring sementara ini kan wall climbingnya hanya untuk speed saja yang lurus keatas itu gaada belokan-belokan, rehabilitasi lintasan atletik yang ada didalam Gelora Delta karena saat ini sudah banyak yang rusak lintasannya, lalu penambahan area jogging track itu memutari stadion Gelora Delta, terus pembangunan dan penataan parkir roda empat dan roda dua yang nantinya akan meminta pihak swasta yang mengatur area parkir ini," [100]

[99] Djoko Supriyadi, wawancara oleh penulis, 01 April 2020.
[100] Djoko Supriyadi, wawancara oleh penulis, 01 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 7. Pemilihan lokasi mengenai rencana pembangunan fasilitas lapangan basket *outdoor* yang berada di sebelah utara gedung olahraga *indoor*

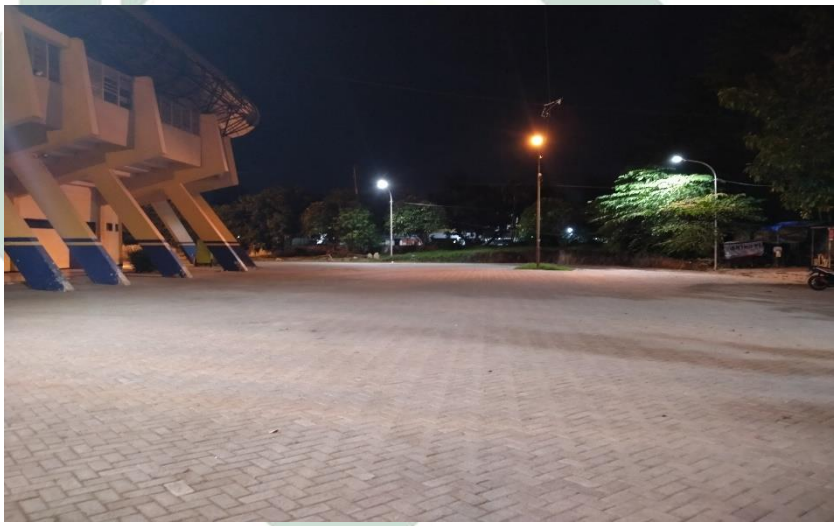

Gambar 8. Pemilihan lokasi mengenai rencana pembagunan fasilitas lapangan futsal *outdoor* yang berada di sebelah timur gedung olahraga *indoor*

berikut merupakan Penjelasan Bapak Djoko Supriyadi dalam menjelaskan konsep kebijakan penataan PKL di kawasan GOR Sidoarjo:

"Lalu yang paling penting itu adalah penataan PKL. Jadi PKL itu bagi kita tidak diusir tidak dibubarkan atau dpindahkan. Tetapi ditata kembali, contoh kalau semua menghadap ke utara ayo menghadap ke utara semuanya, atau PKL ukurannya 1 stan 3X4 ya itu seragam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya, jangan seperti sekarang yang jualan makanan itu stannya bisa sampai 8X12 yang satunya 6X10 lalu yang agak kesana lagi sekian kali sekian ini kan tidak jelas akhirnya banyak pedagang yang memanfaatkan lahan secara tidak baik dengan cara seperti itu, terhadap PKL ini Pemda ini tidak mengusir PKL tetap PKL itu kita butuhkan dalam rangka mendukung kegiatan GOR Cuma ditata dengan lebih baik, karena juga tidak akan nyaman kalau GOR itu sangat sepi karena di GOR itu ditengah-tengah kota di pintu kota, Nah PKL ini kita bagi dua secara umum, PKL makanan dan PKL yang Non-makanan. jadi kita pisahkan antara makanan dan non-makanan. mulai dari alfamart barat sampai kedepannya Wong Solo itu diisi PKL makanan,lalu setelahnya wong Solo itu sampai Genset GOR itu buat PKL yang non-makanan. Kita berharap yang makanan dan minuman itu jualannya pakai kendaraan bahasa kerennya itu Food Truck. Tempat makannya disiapkan oleh Pemda yang satu set meja bundar kursi 4 yang ada payungnya itu juga dikasih lampu-lampu hias itu, kan bertepatan diarea sana ada panggung musik meski tidak terlalu besar setidaknya bisa dimanfaatkan untuk panggung atau konser kecil-kecilan. Untuk PKL non-makanan itu berada di utara disediakan tenda kerucut oleh pemda sidoarjo, jadi tidak seperti sekarang yang seenaknya sendiri mendirikan jualan dimanapun pokoknya bisa dilihat orang-orang. Kenapa kita membuat sistem semacam itu, karena kita tidak ingin membuat menambah bangunan permanen di kawasan GOR karena jika nanti diadakan event besar semua area itu kita gunakan area parkir. Kan sering PKL itu disuruh tutup karena adanya pertandingan besar yang itu membutuhkan lahan parkir, nah ini sebenarnya sangat disayangkan kalau ada pertandingan kok malah PKLnya tidak jualan, kan rugi. Jadi konsepannya merevitalisasi kawasan GOR Sidoarjo dan menata PKL."[101]

[101] Djoko Supriyadi, wawancara oleh penulis, 01 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

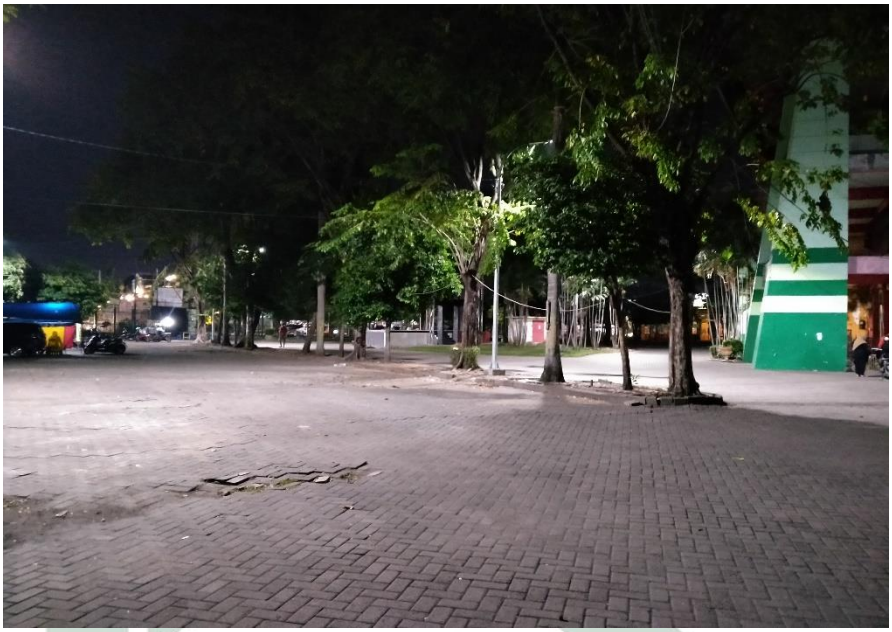

Gambar 9. Pemiilihan lokasi dalam kebijakan penataan PKL makanan dan minuman di sebelah barat daya kawasan GOR Delta Sidoarjo

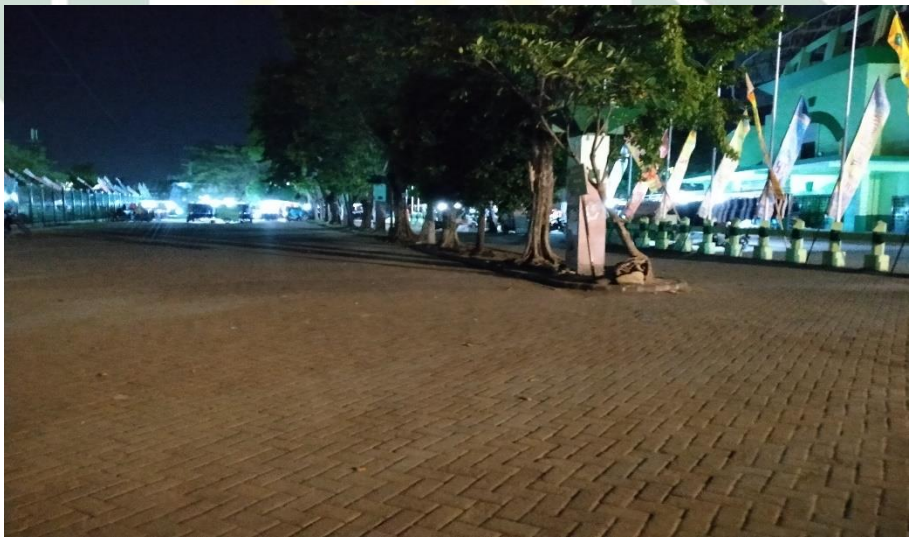

Gambar 10. Pemilihan lokasi dalam kebijakan penataan PKL non-makanan dan non-minuman di sebelah barat laut kawasan GOR Delta Sidoarjo

Dengan penjelasan mengenai revitalisasi kawasan GOR dan penataan PKL, tujuan dilakukannya kolaborasi antara dua sektor yang berbeda adalah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan pendapatan asli daerah, memelihara dan menambah ruang terbuka hijau sesuai dengan misi RPJMD tahun 2016-2021 dan tetap menerima apa yang seharusnya sudah ada disana, terlebih pedagang kaki lima. Berikut konsep *site plan* gambaran kebijakan revitaliasi yang dirancang oleh Disporapar Kabupaten Sidoarjo

Gambar 11. Site Plan Revitalisasi Kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.4.4 Dampak Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Meski proyeksi kebijakan dimulai di tahun 2018 hingga selesai di tahun 2024, kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo sempat mendapat penolakan dari pihak PKL yang beroperasi dikawasan GOR Sidoarjo. Pasalnya, kelompok PKL beranggapan bahwa kebijakan ini tidak menguntungkan pihak mereka, dengan pemberlakuan jam operasional yang mulai diperketat, pembuatan pagar dan pemberlakuan *One Gate System* akan menyusahkan para PKL saat berdagang di kawasan GOR Sidoarjo. Para PKL beranggapan bahwa Pemkab Sidoarjo kurang dalam melakukan sosialisasi kebijakan revitalisasi GOR Sidoarjo yang berakibatkan para PKL tidak siap menanggapi kebijakan yang dikeluarkan.

"jadi pembagunan gerbang itu akhir tahun 2019, memang permasalahan mendasar teman-teman PKL ini adalah seperti mereka tidak dianggap ada disini, kan mereka dulu diundang dan disuruh untuk berjualan, tetapi sampai sekarang dalam pengembangan usaha mereka atau paling tidak pemerintah mempunyai niatan untuk dekat dengan mereka itu sangat minim, malah ada revitalisasi ini yang salah satunya pembangunan pertama melakukan One Gate System, yang itu memutus akses para masyarakat yang mau ke GOR dengan berbagai arah menjadi hanya satu arah saja di bagian timur GOR. Waktu itu sosialisasi mendekati tahun baru, pemahaman teman-teman itu sosialiasi untuk tahun baru saja, juga pembatasan jam operasional sampai jam 11 malam, itu hanya berlaku di malam tahun baruan tapi kenyataanya kok terus. Bentuk sosialisasinya berupa surat, isinya kalau tidak salah itu "pertanggal sekian kawasan GOR ditutup dan jam operasional dimulai jam 16.00-23.00 WIB". [102]

[102] Slamet Hariyanto, wawancara oleh penulis, tanggal 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Bapak Djoko Supriyadi pihak Pemerintah Kabupaen Sidoarjo sudah gencar melakukan sosialisasi mulai tahun 2017 dengan cara tidak bertatapan langsung bersama PKL, akan tetapi memanfaatkan media sosial dan media kabar untuk gencar memberitakan kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo agar masyarakat terutama pihak terkait seperti PKL di kawasan GOR dapat mengambil ancang-ancang atau setidaknya mengetahui akan ada kebijakan revitalisasi kawsan GOR yang itu juga menyentuh ranah penataan PKL. Beliau menjelaskan bahwa sosialisasi untuk berhadapan langsung dengan para pedagang lebih digencarkan di tahun 2020 dengan maksud menunjukkan bagaimana kedepannya penataan PKL di tahun 2021 dan kedepannya.[103]

"kalau tidak salah bulan maret 2020 sosialisasi secara langsung di Pemkab oleh pak Djoko sendiri, beliau mengundang para PKL untuk diberitahukan bahwa akan ada kebijakan revitalisasi dan penataan PKL di GOR Sidoarjo. Dispora juga memberikan layout terkait pembangunan kawasan GOR itu. Tapi sampai saat ini kita tidak diajak berbicara mengenai revitalisasi ini, bagaimana kedepannya kebijakan ini saja kita tidak tahu, taunya ya kemarin setelah sosialisasi, jadi kita sangat minim sekal untuk diajak duduk bersama dan berdiskusi bagaimana baiknya, meskipun itu diskusi non-formal itupun tidak ada dari mereka yang mengajak kita." [104]

Tak ada jalan yang tak rusak, Kebijakan revitalisasi dianggap PKL sebagai wujud pemerintah yang tidak peduli terhadap PKL di kawasan GOR Sidoarjo. Di awal tahun 2020 para PKL mengumpulkan masa dan memprotes kebijakan revitalisasi yang mengarah ke instansi DPRD

[103] Djoko Supriyadi, wawancara oleh penulis, 01 April 2020.
[104] Slamet Hariyanto, wawancara oleh penulis, 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sidoarjo. sebelum melakukan demo, para PKL juga pihak Seven Gab LSM melakukan rapat untuk membahas bagaimana sistematika dan tuntutan apa yang akan dilontarkan saat beraudiensi dengan Pemerintahan persoalannya adalah bagaimana bisa hidup layak kalau satu hingga tiga hari bekerja tetapi pendapatan selalu merosot karena mereka menghasilkan pendapatannya hanya dari berdagang.[105] Hingga akhirnya muncul tuntutan diadakannya demo adalah untuk membuka jalan/akses pintu masuk yang dirasa kebijakan ini menyusahkan PKL dalam berjualan terutama mereka yang memakai gerobak dorong terlebih berjualan di bagian barat, mereka harus rela mendorong gerobak hingga pintu masuk disisi timur. Penutupan pintu masuk disisi barat ini dilakukan karena maraknya pengendara roda 2 yang melawan arus untuk menuju ke kawasan GOR Sidoarjo. kemudian menuntut agar dilonggarkannya jam operasional karena menurut mereka di GOR merupakan kuliner malam yang artinya kawasan GOR semakin malam semakin ramai pengunjung, juga menambahkan bahwa jam operasional yang dimulai pukul 16.00-23.00 terasa sangat kurang lama padahl efektif mereka berjualan itu dimulai pukul 17.00 setelah melakukan persiapan, dan bahkan nampak mulai ramai di pukul 20.00 WIB. Harapan dari pihak PKL adalah menginginkan agar Disporapar Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola kawasan GOR lebih luwes lagi dalam melihat keinginan para PKL dan dapat dibantu dalam meliht

[105] Kasmuin, wawancara oleh penulis, 15 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realita yang terjadi di kawasan GOR Sidoarjo. Setelah dilakukannya audiensi dengan pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo, kebijakan *One Gate system* masih tetap diberlakukan karena penutupan akses jalan sebelah barat merupakan keinginan dari pihak keamanan demi menjaga sirkulasi lalu lintas agar pengendara tertib dan tidak melanggar atau melawan arus, tetapi jika di waktu mendekati hari libur atau ada *event* di kawasan GOR pintu sebelah selatan dibuka, dan mendapatkan kelonggaran penutupan pintu pada pukul 23.00, yang artinya hingga sampai saat ini pemberlakukan penutupan portal pukul 23.00 WIB masih belum diberlakukan. Dan apabila semakin hari semakin berangsur membaik terutama pada pengendara R2 yang melawan arus dan kenyaman di kawasan GOR Sidoarjo artinya semakin berkurangnya tindak kriminal dan semakin asri, maka tidak menutup kemungkinan seluruh akses 4 pintu masuk GOR akan dibuka kembali. [106]

Munculnya kebijakan *food truck* yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendapatkan tanggapan dari pihak PKL yang merasa keberatan dalam menggunakan transportasi roda 4 atau roda 3 untuk mereka membuka usahanya.

"Untuk kebijakan PKL yang mengharuskan memakai foodtruck bagi mamin, apakah semua PKL dapat mampu membeli transportasi semacam itu. Jadi kalau yang mampu okelah silahkan saja tapi kalau yang tidak mampu, itu kan memang sangat memerlukan suatu biaya, kalau yang tidak mampu jadinya gak jualan disana dong terkecuali kalau fasilitas itu disediakan pemerintah, tapi sangat tidak masuk akal jika tanggungan truk makanan tadi jadi beban Pemkab. Misalkan kalau

[106] Slamet Hariyanto, wawancara oleh penulis, tanggal 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang terjadi memakai foodtruck untuk PKL mamin, apa tidak semakin semrawut, tarulah misal 400 PKL kurang lebih, itu ambil 50% mamin, saya rasa akan semakin semrawut." [107]

PKL diberikan harapan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo jika dalam hal penataan berangsur efektif dan mampu menjaga keasrian kawasan GOR Sidoarjo dengan kebijakan yang akan diterapkan yaitu penggunaan truk sebagai sarana berjualan bagi PKL makanan-minuman, dan penataan PKL non-makanan dan non-minuman akan dijadikan sebagai destinasi tempat wisata central makanan juga akan diberikan fasilitas koperasi untuk PKL di kawasan GOR.

"Jika sudah ada kesepakatan kalau ada kebijakan Food Truck dan diterima PKL, ya harusnya difasilitasi pengelanan misalnya pengenalan perbankan atau sejenisnya yang itu mengedukasi mereka agar bisa memenejemen uang masuk dan uang keluar, lebih-lebih mereka akan kreatif dalam berdagang kalau sudah mengenal itu. Tapi memang kalau kebijakan Food Court, itu kelemahannya di daya tampung, 50 PKL itu sudah sangat membutuhkan lahan besar, jadi harus ada alternatif-alternatif. Jadimemang harus ada ketegasan dalam kebijakan ini, harus benar-benar dikaji untuk ide-ide barunya, pasti kita fasilitasi kalau memang dari Pemerintah sendiri kesulitan dalam komunikasi dengan PKL, kita bantu untuk komunikasi dengan mereka" [108]

Memang dalam perencanaan ada dua versi yaitu versi Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan versi Disporapar Kabupaten Sidoarjo, terdapat perbedaan yang mencolok dalam pembahasan penataan PKL, Disporapar Kabupaten Sidoarjo menginginkan diberlakukannya kebijakan *Foodtruck* dan tenda kerucut untuk para PKL, sedangkan Bappeda merancang didirikan *Food Court* dan pasar malam disekitaran

[107] Slamet Hariyanto, wawancara oleh penulis, tanggal 16 April 2020.
[108] Kasmuin, wawancara oleh penulis, 15 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

GOR Sidoarjo. Menurut Bapak Badriyono selaku pembina pedagang informal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, lebih memilih untuk PKL didirikan *food court*. Pasalnya, mengacu pada kebutuhan dan kemampuan PKL dalam mengelola usaha mereka, juga dalam rapat yang dibahas untuk penggunaan *Foodtruck* tidak seperti yang digambarkan bahwa kendaraan akan dimodifikasi sehingga menarik perhatian pembeli, namun lebih mnyimpulkan kebijakan penggunaan transportasi roda 3 atau lebih untuk berjualan. Pihak Disperindag sudah berusaha untuk memilih dan menyakinkan agar diberlakukannya pembangunan *foodcourt*, akan tetapi kembali pada ranah pemerintahan, bahwa yang berhak mengelola dan mengatur kawasan GOR Sidoarjo adalah Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Disperindag hanya menginginkan bahwa PKL tetap bisa berjualan di kawasan GOR Sidoarjo.[109]

"Kalau memang penataan PKL, ya harus segera ditata, tapi jangan sampai mengorbankan posisi PKL. Kalau memang dibatasi jam operasional, ya kitanya diberi kelonggaran untuk buka lebih awal, kita minta PKL itu dibina kalau memang kepingin bersih ya kasihlah fasilitas yang baik, entah itu melakukan penyeragaman bentuk usaha atau bagaimanapun itu terserah sehingga masyarakat masih punya keterterikan untuk kesini. Ya jadi dari kita akan melakukan pendataan ulang, karena dulu memang pendataan hanya sebatas ya yang pindah dari alun-alun itu saja, nantinya pendataan ini akan kita ajukan ke pemerintah jika ada kebijakan-kebijakan yang itu tidak mendukung keinginan PKL. Jadi kita memang nantinya akan mendata, PKL tetap sama PKL musiman, nah itu nanti mungkin bisa jadi pertimbangan pemerintah besok." [110]

[109] Badriyono, wawancara oleh penulis, 06 April 2020.
[110] Slamet Hariyanto, wawancara oleh penulis, 16 April 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keinginan para PKL adalah mereka ingin diperhatikan dan mendapatkan dukungan terutama dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membuka usaha informal mereka. Paguyuban PKL berencana akan melakukan pendataan PKL ulang yang mana data tersebut akan membantu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjumlah berapa banyak PKL yang tetap dan PKL musiman yang artinya mereka hadir pada saat ada *event-event* tertentu. Data ini akan digunakan dalam menetapkan siapa saja PKL yang berhak mendapatkan izin berdagang di kawasan GOR Sidoarjo, dan kemungkinan PKL akan meminta waktu untuk berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan bagaimana baiknya penataan PKL di kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo karena menurutnya sampai saat ini atensi untuk berdiskusi secara langsung dengan *steakholder* kebijakan dan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah masih kurang. PKL akan menerima bagaimana keputusan yang dihasilkan, karena bagaimanapun kawasan GOR merupakan ladang mereka dalam mengais rezeki.

2. Pembahasan Penelitian

2.1 Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo sejatinya dilandasi dengan 6 dasar hukum yang mengatur kebijakan tersebut, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Peraturan Teknis Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 145 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Prasarana Olahraga Prestasi yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah, jika dilihat dari kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo, kebijakan ini akan memberikan sumbangsih pedoman bagi pelaksana kebijakan terutama pemerintah dalam mengatur bantuan dana untuk kebijakan revitalisasi agar tepat sasaran dan kebijakan relatif berjalan secara efektif.

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat dan Olahraga, tinjuan peraturan ini dilakukan untuk mengingatkan tujuan diberlakukannya revitalisasi adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang salah satunya dari hasil retribusi tempat olahraga yang dinilai dapat memberikan banyak pendapatan daerah dari berbagai kegiatan, termasuk adanya *event* formal atau non-fomal, dan retribusi parkir di kawasan GOR Sidoarjo.

(3) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peninjauan dasar hukum berfungsi agar keberadaan dan kepentingan PKL terutama di kawasan GOR yang terdampak oleh kebijakan revitalisasi tetap diperhatikan sehingga keberadaan PKL tidak dianggap seperti pembuat kumuh kota, melainkan dpat mendukung kebijakan kepentingan pemerintah dalam melakukan revitalisasi, terutama dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Perarutran Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai pedoman yang harus dilakukan oleh pemerintahan dalam mengatur dan menata PKL yang berada dikawasan GOR Sidoarjo, peninjauan dilakukan demi menetapkan siapa sajakah yang berhak mendapatkan tempat di kawasan GOR Sidoarjo dan siapa saja yang diharuskan untuk mencari tempat lain selain di kawsan GOR Sidoarjo. hal ini menjadi penting terutama dalam mewujudkan cita-cita kabupaten Sidoarjo dalam mendorong sektor perekonomian daerah dengan memperioritaskan sektor yang paling potensial, terbukti bahwa sektor perdagangan merupakan mata pencaharian mayoritas ketiga masyarakat Sidoarjo jika para pedagang tidak diperhatikan dengan baik, terutama para pedagang informal, maka akan sangat merugikan perekonomian Kabupaten Sidoarjo.

(5) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peninjauan kebijakan ini merupakan misi yang seharusnya dijalankan Pemerintah kabupaten Sidoarjo di tahun 2016-2021 terutama pada kebijakan revitalisasi, keselarasan misi RPJMD dengan kebijakan revitalisasi adalah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur kota yang berguna mendorong pembangunan proporsional dalam arti dapat mendukung misi-misi lainnya.

.(6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dasar hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan menjadi pedoman untuk dilakukannya revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo.Peninjauan dasar hukum ini digunakan agar pemerintah kabupaten Sidoarjo tetap menjalankan amanat undang-undang yang sebelumnya ditulis dan masih berlaku, terutama perautran daerah tentang rencana tata ruang wilayah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adanya kebijakan revitalisasi sejatinya tidak menghilangkan atau tidak memperhatikan kebijakan atas penataan PKL, justru dalam implementasinya kebijakan ini bersifat kolaboratif dengan mengangkat dua permasalahan agar ditemukan satu solusi yang pas, yaitu melakukan revitalisasi kawasan olahraga GOR Sidoarjo dan melakukan penataan kembali PKL agar aktivitasnya tidak mengganggu aktivitas olahraga di GOR Sidoarjo.

Jika mengacu pada tahap-tahapan konsep kebijakan publik menurut James Anderson. Pada tahap penyusunan agenda kebijakan, Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo mengajukan keinginan untuk merevitalisasi kawasan GOR pada tahun 2017 kepada DPRD selaku badan legilatif Kabupaten Sidoarjo agar direncanakan dengan Bupati, alasan yang diajukan adalah adanya disfungsi kawasan GOR yang semakin lama semakin semrawut karena PKL, banyaknya kriminalitas, kumuh, dan tidak mencerminnkan keasrian maupun kerindangan. Alasan tersebut didengar dan hasil dari pengajuan ini adalah dukungan yang diberikan Bupati dan DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan revitalisasi yang dapat dimulai di tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2018. Pada Tahap formulasi kebijakan, sampai saat ini kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo masih tetap mengacu pada site plan yang diarahkan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo, hal ini didasari desakan bahwa pada tahun 2018 kebijakan revitalisasi harus segera dilakukan sehingga arah kebijakan mengacu pada kajian Bappeda Kabupaten Sidoaarjo yang dibentuk tahun 2017. Pada tahap adopsi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkiblat pada kompleks olahraga senayan Jakarta dan kompleks olahraga Jakabraing Palembang, hal ini didasari bahwa kawasan GOR Sidoarjo memiliki banyak fasilitas olahraga yang menempati satu wilayah yaitu di kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo, maka dengan ini kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo bekriblat pada peningkatan fungsi kawasan atau kompleks olaharaga yang dikelola pemerintah daerah.

Pada implementasi kebijakan, melihat realitanya tidak kaku dengan apa yang dirumuskan untuk bagaimana jalannya kebijakan kedepan, terutama pada ketentuan Bupati bahwa yang berhak mengatur jalannya kebijakan di suatu tempat adalah Dinas yang mengelola tempat atau kawasan tersebut, hal itu menandakan bahwa Disporapar Kabupaten Sidoarjo yang berhak memilih dan mengatur bagaimana baiknya kebijakan yang dijalankan. Namun saat ini juga sudah dijalankan kebijakan yang sementara mengacu pada kajian revitalisasi Bappeda Sidoarjo yang dibuat di tahun 2017, terbukti dengan adanya kebijakan pembangunan pagar, pos pengamanan, jam operasional, perbaikan fasilitas umum seperti penerangan jalan umum, drainase, dan melakukan peninggian dan perbaikan jalan agar tidak terjadi banjir yang itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua mengacu pada *Action Plan* yang dibuat oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo. terdapat perbedaan *site plan* yang ditawarkan oleh Bappeda dan Disporapar Kabupaten Sidoarjo terutama pada kebutuhan revitalisasi dan penataan PKL.

Bappeda Sidoarjo merekomendasikan bahwa revitalisasi mengarah pada perawatan fasilitas-fasilitas GOR yang saat ini sudah ada tanpa menambahkan fasilitas baru kecuali *skate track* dan *slalom area,* dan merekomendasikan untuk penataan PKL dengan kebijakan pembangunan *food court* untuk PKL yang berjualan makanan dan minuman, serta memberlakukan area pasar malam untuk PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman alasan yang diberikan adalah untuk kelayakan para PKL dan mencegah terjadinya kawasan yang kumuh dan tidak tertata dengan baik terutama permasalahan PKL. Sedangkan *site plan* yang diajukan oleh Disporapar Kabupaten Sidoarjo dalam merevitalasisi kawasan GOR adalah dengan menambah fasilitas olahraga seperti *jogging track,* lapangan futsal dan basket *outdoor,* dan melakukan perawatan fasilitas yang sebelumnya sudah ada, kemudian untuk penataan PKL dengan menggunakan *foodtruck* bagi PKL makanan dan minuman, dan menggunakan tenda kerucut untuk PKL non makanan dan minuman yang semuanya ditata disebelah halaman barat kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, kebijakan *food truck* dirasa lebih portabel dalam melakukan transaksi jual beli, ditambah lagi jika sewaktu-waktu akan ada *event* olahraga ataupun non-olahraga yang diadakkan di kawasan GOR tidak mengorbankan lagi keberadaan PKL yang sebelumnya selalu diminta tutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sementara agar lahan yang digunakan PKL dapat digunakan untuk parkir kendaraan.

Menurut Grindle, kebijakan publik dapat direalisasikan secara tepat dan benar melalui aktivitas pemerintah yang melibatkan berbagai pihak non pemerintah seperti swasta dan masyarakat yang berkepentingan. Sayangnya dalam perumusan kebijakan yang itu berujung pada pelaksanaan kebijakan, keterlibatan pihak non pemerintahan terutama masyarakat yang berkepentingan seperti halnya PKL yang menempati kawasan GOR Sidoarjo, tidak dilibatkan atau setidaknya mempunyai niatan mendengarkan keinginan PKL, kebijakan dapat dijalankan selaras dengan kemauan para *steakholder*. Terutama PKL yang diundang untuk menempati kawasan GOR, seharusnya ada pemberitahuan secara langsung dan berkala sehingga tidak terjadi kesalahpahaman PKL yang menilai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak menggiatkan pemberdayaan PKL terutama kawasan GOR Sidoarjo.

Ada empat faktor menurut George C. Edward dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika ditarik kedalam realitas permasalahan kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, dalam faktor komunikasi para pelaksana kebijakan harus mengetahui persis informasi yang didapatkan sehingga implementasi kebijakan dapat berjaan secara efektif, kurangnya informasi yang diterima oleh pihak PKL selaku juga pihak pelaksana kebijakan revitalisasi, mengharuskan mereka melakukan kegiatan demo untuk menuntut kejelasan pemerintah dalam menyusun kebijakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasalnya mereka tidak menerima komunikasi secara intens terkait rencana pemerintah melakukan revitalsiasi Kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, komunikasi yanhg dimulai pada tahun 2017 hanya dilakukan pemerintah kabupaten melalui jejaring media dan media massa, sehingga berita tersebut dinilai tidak sampai ke pemahaman PKL, mereka hanya mendapatkan surat pemberitahuan di tahun 2019 dimana isi surat tersebut adalah untuk memulai usaha berdagang pukul 16.00 – 23.00 WIB. Setelah dilakukannya demo oleh PKL untuk menindaklanjuti kebijakan, barulah mereka memahami maksud dari diadakannya kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo merevitalisasi GOR. Terlebih lagi sosialisasi mengenai kebijakan revitalisasi secara langsung baru dimulai di tahun 2020 yang diselenggarakan Disporapar selaku pengelolah kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah sebenarnya sudah menunjukkan keseriusan dalam mengelola kembali kawasan GOR dan juga menata ulang PKL yang berada di kawasan tersebut dan juga di pihak PKL selalu menerima apa yang diarahkan pemerintah terlebih untuk menyelaraskan keinginan kedua belah pihak. Dengan Misi yang tercantum di RPJMD, pemerintah kabupaten Sidoarjo merencanakan akan menggunakan kebijakan revitalisasi kawasan GOR sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi tempat olahraga dan retribusi stan-stan milik pemerintah yang berada di kawasan GOR Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga sudah meenjadwal dalam pelaksanaan dimulainya kegiatan revitalisasi hingga revitalisasi selesai dikerjakan. Pada Struktur kedinasan sebenarnya terjadi fragmentasi yang itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambat laju keefektifitasan kebijakan, adanya dukungan dari Disperindag Kabupaten Sidoarjo untuk memilih *site plan* yang diajukan Bappeda sebagai acuan revitalisasi sedangkan Disporapar Kabupaten Sidoarjo juga didukung keinginan Wakil Bupati untuk menjalankan revitalisasi berdasarkan *site plan* yang dibentuk Disporapar Kabupaten Sidoarjo, tentunya konsep-konsep tambahan yang menguntungkan kedua belah pihak akan terus disusun sehingga dalam kebijakan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Sampai saat ini alternatif-alternatif yang diajukan oleh dinas terkait masih berupa rancangan, masukan dari PKL akan menjadi pertimbangan dengan mengacu konsep yang sudah ada.

2.2 Dampak Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo

Dalam suatu kebijakan baiknya para pemangku kepentingan dan para penggiat kebijakan menilai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, munculnya evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan untuk melihat sebab dan akibat kegagalan dari suatu kebijakan ataukah malah menunjukkan keberhasilan dari kebijakan itu saat dijalankan. Kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo seharusnya melihat bagaimana realitas yang ada dilapangan sejak kebijakan tersebut mulai dilaksanakan, dampak dari kebijakan revitalisasi ini banyak dirasakan oleh para PKL yang berada di kawasan GOR hingga munculnya aksi demo untuk menilai kebijakan revitalisasi sebagi wujud penolakan dari pihak PKL yang terdampak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demo yang dilakukan PKL dan dibantu oleh LSM Seven Gab mengangkat isu diberlakukannya jam operasional di kawasan GOR, pembangunan pagar besi, dan penutupan akses masuk kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo, penerapan kebijakan ini dirasa berdampak buruk pada PKL terutama dalam meraup keuntungan yang dinilai semakin rugi dengan pendapataan selalu merosot karena banyaknya masyarakat yang mengurungkan niat untuk masuk ke kawasan GOR Sidoarjo. Jika dilihat dari teori konflik menurut Rafl Dahrendorf, adanya konflik tidak akan bisa diciptakan tanpa adanya konsensus sebelumnya. Menelisik kebelakang dengan kebijakan relokasi PKL yang berada di alun-alun untuk dipindahkan ke tempat lain pada tahun 2011, kesepakatan antara Tim pembina PKL dengan PKL adalah menempatkan lokasi usaha di kawasan GOR Sidoarjo. Konflik dipicu dengan keresahan PKL yang sampai saat ini tidak mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan kebijakan yang diterapkan juga semakin mencekik pendapatan dari usaha mereka. Akar masalah dari konflik ini muncul karena tidak adanya kesepahaman antara keinginan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan keinginan PKL di kawasan GOR terlebih dalam melakukan penataan PKL, yang memicu adanya aksi penolakan seperti menuliskan tanda protes dilakukan pedagang yang dipasang di depan pagar kawasan GOR Sidoarjo hingga meresa tidak semakin tidak diperhatikan, akhirnya memutuskan untuk beraudiensi dan demo di gedung DPRD dalam rangka ingin diperhatikan segala keluh kesah saat mereka berjualan di kawasan GOR Sidoarjo termasuk dalam kebijakan penutupan pintu/akses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke kawasan GOR Sidoarjo, dan permintaan penambahan jam operasional yang digunakan PKL berjualan. Sebagai bentuk konsensus yang didapatkan pihak PKL dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini adalah dengan tetap dibukanya pintu/portal utama di sebelah tenggara meski larut malam yang berguna untuk memberikan PKL tambahan waktu membereskan usahanya jika sudah mencapai batasan jam yang ditentukan, penambahan satu akses pintu masuk yang diberlakukan sesuai jam operasional berada di sebelah selatan kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo meski masih belum dijalankan secara efektif yang artinya hanya diberlakukan ketika ada *event* atau hari tertentu saja seperti hari libur. Kedua belah pihak akan melakukan pendataan PKL untuk dijadikan berkas verifikasi bahwa penataan PKL sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sebelumnya sudah ada, termasuk PKL yang sudah mempunyai tanda daftar usaha, dan ber-KTP Sidoarjo. kemudian dalam janji yang disampaikan, akan dibuka kembali akses secara bertahap dengan melihat kondisi yang dinilai sudah dapat kondusif, PKL diharuskan untuk *legawa* dalam menerima konsensus/kesepakatan yang diterapkan, pasalnya kebijakan ini juga tidak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, ada sumbangsih pihak keamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang marak dilakukan di kawasan GOR Sidoarjo.

Mengingat dalam konsep Konflik menurut Rafl Dahrendorf dipicu dengan perbedaan distribusi otoritas. Bahwa Pemerintah mempunyai posisi dan otoritas ideal untuk memaksakan suatu kebijakan dan mempunyai hak agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan ditaati oleh masyarakat, sedangkan PKL tidak mempunyai kekuasaan yang ideal dengan hanya menurut apa yang dikatakan Pemerintah, sudah cukup bagi mereka untuk tetap bisa berjualan. Dengan membentuk kelompok kepentingan dan kelompok konflik, PKL mencoba mempengaruhi ketetapan kebijakan agar lebih dapat berpihak kepada kepentingan PKL/

Jika melihat pada tipe klasifikasi kelompok sosial menurut Dahrendorf, kelompok PKL merupakan kelompok kepentingan dan kelompok konlflik, artinya mereka mempunyai kepentingan dalam memenuhi agenda politik dalam hal ini mempengaruhi ketetapan kebijakan revitalisasi kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan jika diteliti menurut Gabriel Almond, kelompok PKL merupakan kelompok Non-Asosiasional yang mana kelompok ini jarang sekali diorganisasi dengan baik dan hanya merespon isu yang spesifik dengan kepentingannya, yang mana keanggotan dari kelompok ini memiliki identitas yang sama.

Jika dilihat dari evaluasi dalam kebijakan Revitalisasi GOR Sidoarjo, arahan pembangunan untuk meningkatkan kualitas kawasan olahraga sudah sangat baik direncanakan, dengan cita-cita untuk mengembalikan keasrian GOR Sidoarjo, dan kembali mencatatkan prestasi kepada para atlet-atlet dengan diberikan fasilitas yang layak, terlebih ditambahkannya fasilitas keamanan berupa pagar, pemberlakuan pintu masuk-pintu keluar, dan pos penjagaan setidaknya dapat meminimalisir adanya tindakan negatif yang dilakukan di kawasan GOR Sidoarjo. Menjadikan catatan penting bahwa kebijakan revitalisasi kawasan GOR jika dijalankan dengan tepat dan efisien

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berdampak pada kondisi jangka panjang daerah termasuk dalam peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten yang diambil dari retribusi sewa tempat di kawasan GOR Sidoarjo.

Konsep penataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidaorjo dalam hal ini menata PKL teurtama non-makan dan non-minuman dengan membuat kebijakan penggunaan tenda kerucut dirasa tidak terjadi penolakan, sayangnya konsep penataan PKL dengan menggunakan *food truck* sedikit mendapatkan penolakan dari pihak PKL. Mereka mengganggap bahwa berdagang menggunakan *foodd truck* untuk PKL makanan dan minuman memang efisien, tetapi mereka keberatan dalam membeli kendaraan roda tiga atau roda empat, terlebih setelah diberlakukannya *One Gate System dan* jam operasional, pendapatan para PKL kian menurun. Jika dilihat dari dimenasi analisa evaluasi kebijakan, PKL memang menginginkan adanya perhatian pemerintah termasuk dalam penataan PKL, namun para PKL masih belum siap jika langung diwajibkan menggunakan kendaraan berjalan atau *food truck* sebagai alat mereka dalam berjualan, mereka menginginkan kejelasan dari kebijakan tersebut bahwa dengan memilih *food truck* itu dapat memperoleh keutungan yang lebih banyak atau malah justru stagnan dalam memperoleh pendapatan. Hal ini juga perlu menjadi pertimbangan bahwa melakukan usaha serupa memerlukan persiapan mental yang kuat dari para PKL dan memahami resiko yang ada hingga berujung pada kebangkrutan usaha. Hal ini menjadikan catatan bahwa perlunya keterbukaan komunikasi antara pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan para pelaksana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan terutama pada permasalahan kebijakan penggunaan *food truck*. Perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk membuat para PKL menjadi lebih optimis dengan tetap melihat realita yang ada.

Dampak dari kebijakan sebenarnya juga dapat dirasakan diluar kelompok sasaran kebijakan seperti halnya masyarakat yang menggunakan fasilitas kawasan GOR dan juga para atlet yang sedang dilatih dengan menggunakan fasilitas yang ada di GOR Sidoarjo. dengan diberlakukannya pemeliharaan kawasan GOR Sidoarjo akan meningkatkan intensitas masyarakat untuk datang di kawasan tersebut. Selama ini kawasan GOR Sidoarjo juga merupakan sarana dari *event-event* olahraga besar seperti Piala AFF, jika dilakukannya revitalisasi secara efektif dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, bukan tidak mungkin kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo menjadi pertimbangan baru untuk para penggiat pelaksana kegiatan olahraga lainnya. Dengan otomatis, hal ini juga meningkatkan citra kawasan GOR Kabupaten Sidoarjo kepada banyak masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data informasi, dan analisis yang didapatkan, maka permasalahan penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Revitalisasi Kawasan Gelanggang Olahraga Kabupaten Sidoarjo diinisiasikan oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk menambah fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga, dan juga merawat fasiltias-fasiltias yang sudah ada sebelumnya, tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan fungsi kawasan GOR sebagai kawasan olahraga, meningkatkan pendapatan asli daerah dari perolehan retribusi fasilitas yang tersedia, meningkatkan prestasi para atlet dengan fasilitas yang memadahi, meningkatkan kenyamanan, keamanan serta ketertarikan masyarakat yang berkunjung, dan menghapus *image* buruk yang selama ini dipandang sebagai kawasan berkumpulnya masyarakat yang melakukan kegiatan negatif. Terlepas dari itu, kebijakan Revitalisasi GOR juga mendukung adanya penataan PKL. Dalam kebijakan penataan PKL saat ini untuk diarahkan posisi berdagang yang semula menyebar acak di seluruh bagian kawasan GOR Sidoarjo agar menempati bagian barat yang sudah direncanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk sentra PKL dengan pemisahan antara PKL yang berjualan makanan-minuman dan PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman. Dalam konsep penataan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para PKL, bagi mereka yang menjual makanan dan minuman dapat menggunakan *food truck* atau kendaraan bermesin untuk membuka usaha, sedangkan PKL yang berjualan non-makanan dan non-minuman akan disediakan tenda untuk mereka berjualan.

2. Upaya revitalisasi kawasan juga mempunyai dampak bagi keberadaan pedagang kaki lima dikawasan GOR Delta Sidoarjo. Dengan adanya penataan kawasan GOR Delta Sidoarjo salah satu kebijakannnya adalah menutup ketiga akses keluar-masuk pintu kawasan GOR Delta Sidoarjo berakibat pada semakin berkurangnya pengunjung yang datang ke kawasan GOR Delta Sidoarjo, secara otomatis pendapatan yang mereka peroleh setiap hari semakin menurun hingga banyak dari mereka pindah dan beberapa memilih menghentikan kegiatannya. Para PKL juga menanggapi adanya kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi ekonomi mereka terlebih pada masalah kebijakan penggunaan *food truck* bagi PKL yang berjualan makanan-minuman. Bagi mereka sangat sulit jika harus mengadakan kendaraan untuk mereka berjualan terlebih pendapatan mereka yang kian menurun setiap harinya. Para PKL menginginkan adanya informasi yang transparan sehingga memahami informasi tentang kebijakan untuk dilakukannya penataan PKL. Saat ini Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidaorjo sebagai pihak pengelola Kawasan GOR masih bersedia menerima setiap usulan dalam kebijakan penataan dengan tetap memperhatikan konsep yang sudah terbangun sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Saran

Berdasarkan paparan penelitian Diatas, dapat diperoleh saran sebagai bentuk pertimbangan untuk pemecahan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo sedang dijalankan, akan lebih baiknya setiap dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan tetap mempunyai tujuan dan keinginan yang sama dalam mencapai cita-cita kebijakan tersebut, baik dalam hal menata kawasan olahraga GOR Sidoarjo dan dalam melakukan penataan PKL di kawasan GOR Sidoarjo. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga keselarasan tujuan dan mencegah adanya fragmentasi internal pemerintahan dengan perlu untuk selalu mengadakan berdiskusi dan merencanakan bagaimana kebijakan ini diselenggarakan mengingat permasalahan yang diangkat adalah dua permasalahan besar. Konsep kebijakan yang sudah tertata baik akan sangat disayangkan jika pelaksana kebijakan masih berkutat pada masalah internal pemerintahan untuk menjalankan konsep revitalisasi dan penataan mana yang akan dijadikan keputusan final sehingga perlu adanya komunikasi yang melibatkan seluruh *stakeholder* kebijakan. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang maka seharusnya pemerintah memanfaatkan kewenangan tersebut dengan sebaik-baiknya, secara transparansi baik dalam segi perencanaan dan pengeksekusian kebijakan revitalisasi kawasan GOR Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Peningkatan intensitas komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, terutama Disporapar Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola kawasan GOR Delta Sidoarjo dan para PKL terdampak yang berada di GOR Delta Sidoarjo yang nantinya akan mewujudkan keselarasan keinginan dari kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan kebijakan. Terlebih lagi dalam pelaksanaan penataan PKL dengan menggunakan *food truck* yang rencananya mulai dijalankan di tahun 2021. Jika memang keputusan menggunakan *food truck* sebagai alternatif yang sangat bagus untuk penataan PKL maka baiknya untuk sementara waktu PKL diberikan keleluasan dalam hal mendapatkan keuntungan demi menjaga stabilitas ekonomi mereka terlebih dahulu dengan cara tetap menggunakan fasilitas yang ada seperti gerobak dorong dan tenda-tenda yang mereka punya dengan tetap diatur dan diberlakukan penataan pemisahan antara PKL makanan-minuman dan PKL non makakan-non minuman agar para penggiat usaha ditata di halaman barat GOR Delta Sidoarjo. Dibuatkan sosialisasi pentingnya pengaturan keuangan dan penguataan mental dalam hal bisnis sehingga pemahaman dan rasa optimistis PKL mulai muncul untuk menggunakan *food truck* sebagai sarana mereka berjualan, dan melakukan penjadwalan ulang untuk PKL bisa mulai menggunakan *food truck.* Jika memang kebijakan *food truck* dijalankan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus bermitra dengan para PKL agar PKL yang berada di kawasan tersebut mempunyai komitmen untuk menjalankan usahanya di kawasan GOR Delta Sidoarjo dengan tujuan saling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguntungkan dari kedua belah pihak. Apabila jumlah PKL yang akan ditata melampaui batas kapasitas yang tersedia di barat kawasan GOR Delta Sidoarjo, Pemerintah perlu melakukan pendataan secara serius untuk menetapkan siapa saja yang berhak menggunakan lahan untuk berjualan dengan tetap memperhatikan protokol dari keputusan Bupati tentang penataan dan pendataan PKL sehingga data yang diputuskan menjadi data final bukan data yang bersifat sementara, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembludakan hadirnya pelaku usaha baru di kawasan GOR Delta Sidoarjo yang saat ini memang diinformasikan bahwa pelaku usaha dagang baru dengan mudahnya berdagang tanpa memperhatikan aturan yang mengakitbakan kumuhnya kawasan GOR Delta Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Faried, dkk. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenamedia Group.

Fermana, Surya. 2017. *Kebijakan Publik Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.

Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas/ Karya Ilmiah*. Bandung: Refika Aditama.

Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama, dan Humaniora*. Yogyakarta: Paradigma.

Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Sholeh, Shonhadji, dkk. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Marijan, Kacung. 2013. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad Ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis Jilid 2.* Jakarta: Prenada Media Group.

Moleong, Lexi J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakaraya Offset.

Setyabudi, Ismanto. 2015. *Panduan Praktis Praktis Peneltian Ilmiah*. Yogyakarta: Gave Media.

Shilalahi, U. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial.* Bandung: PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Uha, Ismail Nawawi. 2012. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dwi Putra Pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.

Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adhimah, Asyfi'atul. 2019. *Penggunaan Sumber Mata Air Curan dan Konflik Pada Masyarakat Desa Ngawun Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.* Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Bilqisa, Cintatya Cindy. "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di alun-Alun Sidoarjo." http://repository.unair.ac.id/16600/

Caturini, Hertiningtyas. 2014. *Revitalisasi Kawasan Dengan Pendekatan Responsive Environment di Kota Tua Jakarta.* Skripsi Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Darmawan, Sukoco. 2013. *Revitalisasi Kawasan Pasar Ikan sunda Kelapa Sebagai Kawasan Wisata Bahari di Jakarta.* Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Fikry, Riza Ali. "Hubungan Dialogis Tim Pembina Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan Manajemen Publik ISSN 2303-341X*: Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Gozali, Yusdi. 2011. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kecamatan Brebes.* Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Ikrom. "Konflik Prita VS RS OMNI Pembacaan Teori Dahrendorf. The Dialectical Conflict Theory." *Jurnal at-Taqaddum:* http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/500/449

Imronah, "Implementasi Kebijakan Publik: Perspektif Model, dan Kriteria Pengukurannya." https://www.neliti.com/id/publications/218199/implementasi-kebijakan-perspektif-model-dan-kriteria-pengukurannya

Kahfi, Rakean Tajali. 2019. *Analisis dan Usulan Strategi dan Bauran Ritel Food Truck di Kota Bandung.* Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karuniawan, Mochammad Hatta,dkk. 2015. “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)" (Studi PKL di Gelanggang Olahraga (GOR) Kabupaten Sidoarjo).” *JKMP (ISSN. 2338-445X*) : Volume 3, Nomor 1, Maret

Kusuma, Ahmad Surya Hadi. “Problematika Pentaan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Taman Pinang Sidoarjo.” http://repository.unair.ac.id/75023/1/ABSTRAK_Fis.P.71%2018%20Kus%20i

Prabawati, Indah. 2012. “Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Alun-Alun ke Gor Delta Sidoarjo).” *Jurnal Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya*: Volume 01 Nomor 01, 0-216

Saputri, Dian Palestina. “Izin Usaha Mendirikan Usaha Food Truck dan Peluang Bisnis Food Truck.” *Research Gate Jurnal Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum*: https://www.researchgate.net/publication/336743268

Sasmita, Nadia. “Pengertian, Jenis-Jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik.” *Jurnal Kebijakan Publik*: http://www.academia.edu/4694245/Pengertian_Jenis-jenis_dan_Tingkat-tingkat_Kebijakan_Publik

Sukasih, Poni. “Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.” http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=320293

Tualeka, M. Wahid Nur. 2017. “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern.” *Jurnal Al-Hikmah:* Volume 3, Nomor 1, Januari. http://103.114.35.30/index.php/Ah/article/view/409

Zakariah, Miftah Luthfie Darayu. 2010. *Revitalisasi Sempadan Sungai Cikapundung Sebagai Kawasan Wisata Waterfront City di Kota Bandung. mif Indonesia Tasikmalaya*.

Rahmaniah, Aniek. “Teori Konflik: Rafl Dahrendorf.” Artikel UIN Maulana Malik Ibrahim

Sutriani, Ela. “Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data”. Makalah STAIN Sorong

Kajian Akhir Bappeda Kabupaten Sidoarjo Revitalisasi Kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Ketertiban Pedagang Kaki Lima dan Parkir Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 TAHUN 2010 Tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Selayang Pandang Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Okezone.com. "Relokasi Alun-alun Ditunda Lagi. diakses 30 Januari 2020." https://www.google.com/amp/s/news.okezone.com/amp/2011/05/16/340/457822/relokasi-pkl-alun-alun-ditunda-lagi.

Radar Surabaya. "Kebut Revitalisasi GOR Delta, Terapkan Batasan Jam dan Tata Stan." diaskes 31 Januari 2020. https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2019/07/16/146334/kebut-revitalisasi-gor-delta-terapkan-batasan-jam-dan-tata-stan.

Surabaya Tribun. "GOR Sidoarjo Terkini, Temuan Dewan dan Aparat: Sejumlah Fasilitas Dipakai Berjualan Minuman Keras." diakses 25 Februari 2020. https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2020/01/09/gor-sidoarjo-terkini-temuan-dewan-danaparat-sejumlah-fasilitas-dipakai-berjualan-minuman-keras.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id